

Visualisasi 3D Infrastruktur Fiskal dan Fiskalisasi Nagari



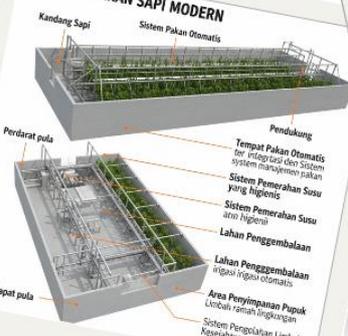
Alur Proses Fiskalisasi Nagari



Visualisasi Merah Putih Nagari



PETERNAKAN SAPI MODERN



Dana LPDP Daerah Lima Puluh Kota



Transformasi Fiskal Berkelanjutan Sumatera Barat: Peran Kanwil DJPb dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Kabupaten Lima Puluh Kota

## EXECUTIVE SUMMARY

Dokumen strategis ini menguraikan visi komprehensif Kanwil DJP Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudkan **kemandirian fiskal daerah** melalui **optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**. Fokus utama adalah pada Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai model implementasi, yang dapat direplikasi di seluruh wilayah Sumatera Barat. Pendekatan ini menekankan **kolaborasi multi-pihak** dan **pemanfaatan teknologi** untuk menciptakan ekosistem pengelolaan pendapatan yang inovatif dan berkelanjutan.

Strategi utama yang diusung meliputi tujuh pilar interdependen:

1. **Reformasi Strategis Pengelolaan Pendapatan Daerah:** Menggeser paradigma dari tanggung jawab Bapenda semata menjadi **beban bersama seluruh OPD**, mendorong *impact spending*, dan mewajibkan setiap proposal kegiatan mengandung estimasi kontribusi PAD.
2. **Digitalisasi Pembayaran:** Mendorong adopsi **QRIS** sebagai instrumen pembayaran PAD utama, didukung oleh *dashboard* terintegrasi *real-time*, sistem layanan digital lintas OPD, serta skema insentif dan sanksi berbasis digital untuk meningkatkan kepatuhan.
3. **Monetisasi Aset Daerah (Berwujud dan Tak Berwujud):** Mengoptimalkan aset fisik melalui skema *inbreg* dan menggali potensi aset tak berwujud (misalnya, kekayaan intelektual digital), didukung oleh model manajemen dan evaluasi aset digital yang transparan.
4. **Diversifikasi Sumber PAD Berbasis Potensi Unggulan Daerah:** Mengidentifikasi dan mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui **hilirisasi komoditas unggulan**, pengembangan **perikanan air tawar, peternakan dan zona sapi rakyat, wisata dan ekowisata nagari, sawah pokok murah dan pangan strategis**, pembentukan **Nagari Creative Hub**, penguatan **Koperasi Merah Putih Nagari**, serta mengubah **pengelolaan sampah nagari menjadi sumber PAD** melalui ekonomi sirkular.
5. **Peningkatan SDM Melalui Skema LPDP Daerah:** Membangun **Kampung Pelajar Nagari** sebagai pusat pengembangan SDM unggul (termasuk ASN dan masyarakat umum), dengan fokus pada literasi digital, bahasa asing, dan kewirausahaan, serta skema imbal balik yang berkontribusi pada PAD.
6. **Koperasi Merah Putih Nagari untuk Pengungkit PAD dan Ekonomi Kerakyatan:** Menempatkan koperasi sebagai entitas strategis yang beroperasi di sektor riil dan lintas nagari, berkontribusi pada PAD melalui dividen, kemitraan logistik UMKM, dan peran sebagai *offtaker* hasil panen rakyat.
7. **Infrastruktur Fiskal dan Fiskalisasi Nagari:** Membangun fondasi digitalisasi fiskal di tingkat nagari, melakukan fiskalisasi aset nagari, menata ulang transfer fiskal berbasis kinerja (TFBK), dan mengembangkan pusat data fiskal daerah untuk akuntabilitas dan pengambilan keputusan berbasis data.

Kanwil DJP Provinsi Sumatera Barat berkomitmen penuh untuk mengawal implementasi strategi ini, melalui pendampingan, edukasi, dan sinergi kebijakan, demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih produktif, mandiri, dan menyejahterakan masyarakat Sumatera Barat.



# KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Sumatera Barat dengan bangga mempersembahkan naskah strategis ini. Dokumen ini merupakan wujud nyata komitmen kami dalam mendukung percepatan pembangunan dan kemandirian fiskal di seluruh wilayah Sumatera Barat, khususnya melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kami menyadari sepenuhnya bahwa kemandirian fiskal daerah adalah fondasi krusial bagi terwujudnya pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi erat antara Kanwil DJP Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), entitas ekonomi di tingkat nagari, serta seluruh elemen masyarakat menjadi esensial. Melalui sinergi yang kuat, kami berupaya menciptakan ekosistem keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efisien, dan produktif.

Naskah ini merangkum berbagai inisiatif strategis yang mencakup reformasi pengelolaan pendapatan, digitalisasi sistem pembayaran, monetisasi aset daerah, diversifikasi sumber PAD berbasis potensi unggulan lokal, peningkatan kapasitas SDM, penguatan peran koperasi, hingga pembangunan infrastruktur fiskal nagari. Kami berharap, setiap gagasan yang tertuang di dalamnya dapat menjadi panduan dan inspirasi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menggali potensi daerah secara maksimal, mengubah tantangan menjadi peluang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang inklusif.

Padang, Juni 2025

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat

Ditandatangani secara elektronik  
Mohammad Dody Fachrudin

# DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I.....	1
REFORMASI STRATEGIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH .....	1
1.a. Peningkatan PAD sebagai Beban Bersama Seluruh OPD .....	1
1.b. Belanja Berbasis Impact (Impact Spending).....	1
1.c. Perubahan Kultur dari Fokus Belanja ke Fokus Pendapatan .....	3
1.d. Proposal Wajib Mengandung Estimasi PAD.....	4
1.e. Screening Belanja Berbasis Efisiensi dan Dampak Fiskal .....	5
BAB II.....	7
DIGITALISASI PEMBAYARAN .....	7
2.a. QRIS Sebagai Instrumen Pembayaran PAD .....	7
2.b. Dashboard PAD Terintegrasi Real-Time .....	8
2.c. Sistem Integrasi Pelayanan dan Pembayaran Digital Lintas OPD .....	9
2.d. Insentif dan Sanksi Digital.....	10
2.e. Trigger Dividen untuk Semua BUMD sebagai Instrumen Digitalisasi PAD dan Efisiensi Fiskal .....	11
2.f. Interkoneksi Sistem Pembayaran PAD Antar-OPD dan Nagari .....	12
2.g. Insentif Berbasis Kinerja Digital untuk OPD dan Nagari .....	13
2.h. Audit Digital dan Penegakan Kepatuhan Fiskal Berbasis Teknologi .....	14
2.i. Pengembangan Ekosistem QRIS Ekspansi ke Sektor Non-Tradisional .....	15
2.j. Sistem Reward QRIS Nagari dan UMKM untuk Meningkatkan Literasi Digital Fiskal .....	16
BAB III .....	18
MONETISASI ASET DAERAH (BERWUJUD DAN TAK BERWUJUD) .....	18
3.a. Monetisasi Aset Berwujud Melalui Pola Inbreng.....	18
3.b. Monetisasi Aset Tak Berwujud .....	18
3.c. Model Manajemen dan Evaluasi Aset Digital.....	19
BAB IV .....	20
DIVERSIFIKASI SUMBER PAD BERBASIS .....	20
POTENSI UNGGULAN DAERAH.....	20
4.a. Hilirisasi Komoditas Unggulan .....	20
4.b. Perikanan Air Tawar.....	21

4.c. Peternakan dan Zona Sapi Rakyat .....	21
4.d. Wisata dan Ekowisata Nagari .....	21
4.e. Sawah Pokok Murah dan Pangan Strategis.....	21
4.f. Nagari Creative Hub dan Produk Digital Nagari.....	21
4.g. Koperasi Merah Putih Nagari.....	21
4.h. Pendidikan Global dan Kampung Pelajar Nagari .....	21
4.i. Pengelolaan Sampah Nagari sebagai Sumber PAD dan Ekonomi Sirkular .....	22
<b>BAB V .....</b>	<b>28</b>
<b>PENINGKATAN SDM MELALUI SKEMA LPDP DAERAH .....</b>	<b>28</b>
5.a. Skema LPDP Daerah Lima Puluh Kota .....	28
5.b. Skema Pembiayaan dan Mitra.....	28
5.c. Imbal Balik dan Kontribusi PAD .....	28
<b>BAB VI .....</b>	<b>30</b>
<b>KOPERASI MERAH PUTIH NAGARI UNTUK PENGUNGKIT PAD DAN EKONOMI KERAKYATAN.....</b>	<b>30</b>
6.a. Struktur dan Fungsi Koperasi Merah Putih .....	30
6.b. Sektor Fokus dan Kontribusi PAD .....	30
6.c. Model Implementasi dan Contoh Lapangan .....	30
6.d. Kelembagaan dan Dukungan Kebijakan.....	31
<b>BAB VII .....</b>	<b>32</b>
<b>INFRASTRUKTUR FISKAL DAN FISKALISASI NAGARI.....</b>	<b>32</b>
7.a. Digitalisasi Fiskal Nagari.....	32
7.b. Fiskalisasi Aset Nagari.....	32
7.c. Penataan Transfer Fiskal Berbasis Kinerja (TFBK) .....	32
7.d. Pusat Data Fiskal Daerah .....	32
<b>BAB VIII .....</b>	<b>34</b>
<b>PENINGKATAN DANA TRANSFER DAERAH DAN SINERGI PERPAJAKAN PUSAT–DAERAH.....</b>	<b>34</b>
8.a. Perbaikan Database Parameter Transfer ke Daerah.....	34
8.b. Dukungan Aktif terhadap Pemungutan Pajak Pusat (PPH dan PPN).....	34
<b>BAB X .....</b>	<b>35</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>35</b>
<b>Biodata Penulis.....</b>	<b>36</b>

## BAB I

### REFORMASI STRATEGIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

#### 1.a. Peningkatan PAD sebagai Beban Bersama Seluruh OPD

Selama ini, paradigma yang berkembang di lingkungan pemerintahan daerah adalah bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tanggung jawab teknis Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) semata. Pola pikir ini harus diubah secara mendasar. Peningkatan PAD perlu dipahami sebagai tanggung jawab kolektif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap OPD, tanpa kecuali, harus merancang kegiatan dan program kerja yang memiliki implikasi langsung atau tidak langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah. Pendekatan ini tidak hanya memperluas basis pendapatan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas kinerja OPD berdasarkan hasil fiskal.

Sebagai contoh konkret, Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat menyusun regulasi pemanfaatan aset pendidikan—seperti gedung sekolah, lapangan olahraga, atau aula—untuk disewakan kepada publik pada hari-hari libur atau di luar jam operasional. Kegiatan seperti pelatihan, seminar komunitas, atau acara keluarga yang menggunakan fasilitas sekolah akan membayar retribusi resmi yang masuk ke kas daerah. Sistem ini bisa dilengkapi dengan mekanisme pemesanan digital dan pengelolaan transparan oleh UPT sekolah, yang kemudian menyetor ke kas daerah melalui QRIS.

Selanjutnya, Dinas Kesehatan dapat membuka layanan medical check-up dan rapid test berbayar di Puskesmas unggulan, misalnya di Kecamatan Harau dan Luak, yang memiliki fasilitas memadai. Layanan ini menyasar masyarakat umum dan pelaku UMKM yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan berkala sebagai syarat usaha. Retribusi dari layanan ini dapat menjadi sumber PAD baru yang berkelanjutan.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat memungut retribusi dari kegiatan sertifikasi bibit ternak, pemeriksaan kesehatan hewan, dan distribusi vaksin. Misalnya, peternak sapi di Kecamatan Guguk atau Akabiluru yang hendak menjual bibit ke luar daerah diwajibkan mengantongi sertifikat kesehatan dan identitas ternak. Proses ini dapat dikenakan retribusi resmi yang masuk sebagai penerimaan sah daerah.

Dinas Perhubungan juga dapat mengelola potensi PAD dari sektor parkir, terutama di lokasi wisata seperti Lembah Harau atau objek wisata baru seperti Saribu Gonjong. Parkir yang selama ini dikelola secara tradisional oleh kelompok masyarakat lokal bisa ditransformasikan ke sistem resmi, di mana OPD mengelola pengutipan parkir dengan sistem tiket digital dan hasilnya disetor langsung ke kas daerah.

Dengan menjadikan setiap OPD sebagai penyumbang PAD, Kabupaten Lima Puluh Kota dapat membangun sistem fiskal yang lebih merata, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi struktural. Hal ini sekaligus mengubah mindset birokrasi dari sekadar pengguna anggaran menjadi produsen nilai ekonomi daerah.

#### 1.b. Belanja Berbasis Impact (Impact Spending)

Paradigma belanja daerah selama ini terlalu terfokus pada aspek penyerapan anggaran, bukan pada hasil atau dampak ekonominya terhadap pertumbuhan penerimaan. Untuk mencapai kemandirian fiskal yang nyata, belanja daerah harus bergeser dari sekadar pengeluaran administratif menuju belanja yang berdampak langsung terhadap peningkatan PAD—dikenal sebagai *impact spending*. Dalam kerangka ini, setiap rupiah yang dibelanjakan oleh OPD harus ditautkan dengan potensi menciptakan atau memperluas sumber pendapatan daerah, baik melalui retribusi, pajak daerah, penyewaan aset, atau bentuk lain yang sah.

Sebagai ilustrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mengusulkan program revitalisasi Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) di Nagari Koto Tinggi dan Nagari Taeh Baruah. Program ini tidak cukup hanya membangun fasilitas fisik seperti gedung produksi,

tetapi harus disertai analisis fiskal: berapa UMKM baru yang akan terdaftar dengan NIB, berapa potensi retribusi sewa produksi, tarif listrik komersial, hingga pajak reklame yang dapat ditarik dari papan-papan usaha yang beroperasi di sana. Misalnya, jika 50 UMKM baru muncul pasca-revitalisasi, dan setiap UMKM membayar retribusi sewa sebesar Rp500.000/bulan, maka daerah bisa memperoleh Rp300 juta per tahun dari satu sentra.

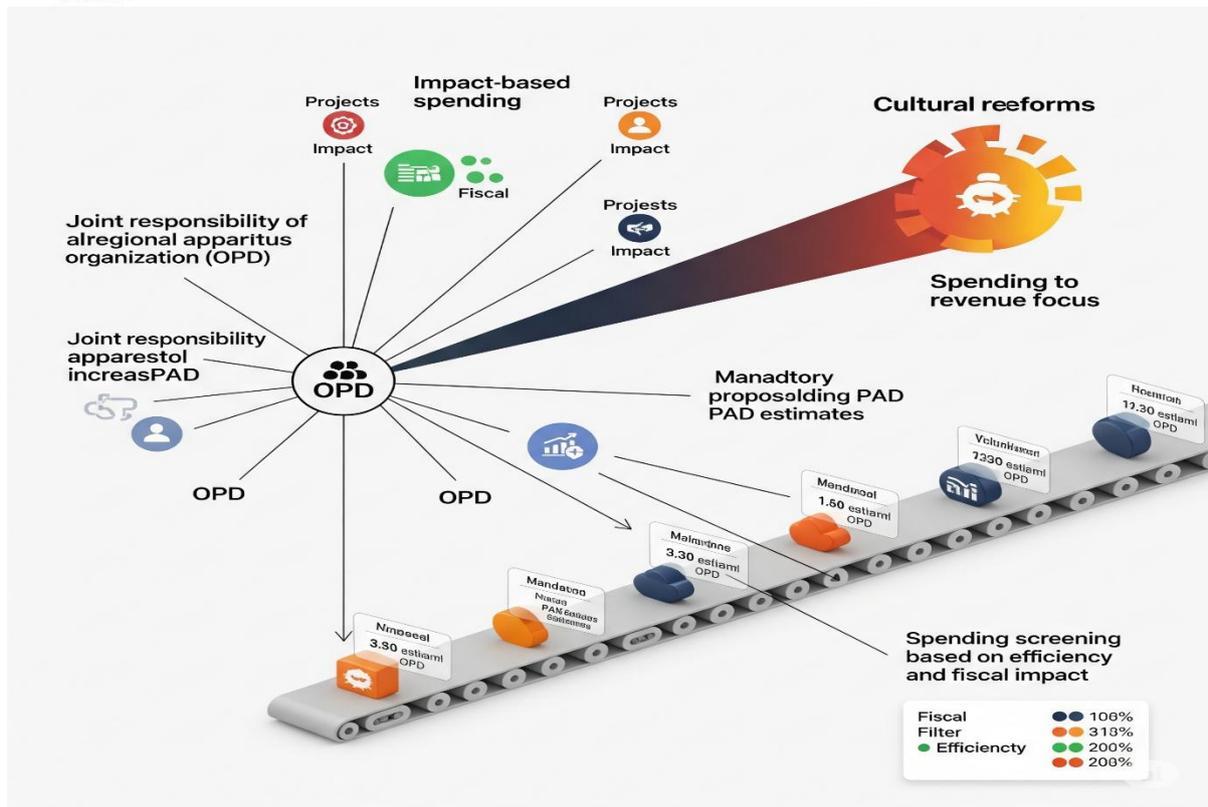
Contoh lain berasal dari Dinas Perikanan, yang dapat mengusulkan pengadaan alat pascapanen seperti mesin pengolah fillet ikan atau pengeringan ikan asap di Kecamatan Harau dan Kecamatan Mungka. Namun, pengadaan alat ini tidak hanya dilihat sebagai belanja barang, tetapi juga investasi daerah untuk menghasilkan PAD. Alat tersebut bisa disewakan kepada kelompok pembudidaya dengan tarif per pemakaian, serta mengatur hasil pengolahan dengan branding resmi “Produk Ikan Nagari Harau” yang dilisensikan melalui Dinas Koperasi dan UMKM. Dalam satu tahun, dari retribusi sewa alat saja, PAD bisa ditargetkan Rp100–200 juta.

Selanjutnya, Dinas Pariwisata bisa menerapkan impact spending dalam setiap pembangunan atau pengembangan objek wisata. Misalnya, pembangunan fasilitas parkir, taman tematik, atau toilet pintar di Lembah Harau atau kawasan Padang Mangateh. Semua harus dirancang berbasis analisis potensi PAD: berapa pengunjung baru yang akan datang, tarif retribusi per orang, serta nilai retribusi dari kios dan warung yang akan menyewa ruang di sekitarnya. Jika ditargetkan ada 100.000 pengunjung baru dengan tarif retribusi Rp10.000, potensi PAD dari retribusi tiket masuk saja sudah mencapai Rp1 miliar per tahun.

Program pembangunan Pasar Nagari di Kecamatan Mungka dan Kecamatan Guguk oleh Dinas Koperasi dan UMKM juga bisa menjadi contoh nyata belanja berbasis impact. Sebuah pasar yang terstandar, dengan sistem sewa digital, parkir terintegrasi, dan retribusi sampah yang ditarik secara elektronik melalui QRIS, bisa menjadi sumber PAD baru. Jika pasar memiliki 150 kios dengan retribusi rata-rata Rp10.000 per hari, maka potensi PAD per tahun bisa mencapai lebih dari Rp500 juta.

Dengan pendekatan impact spending, setiap OPD diarahkan untuk merancang kegiatan dan proyek tidak hanya berdasarkan logika teknis, tetapi juga analisis fiskal. Hasilnya bukan hanya kegiatan yang selesai secara fisik, tetapi juga meninggalkan jejak finansial yang dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Berikut adalah penyajian butir 1.c: Perubahan Kultur dari Fokus Belanja ke Fokus Pendapatan, dilengkapi contoh konkret dari Kabupaten Lima Puluh Kota:



### 1.c. Perubahan Kultur dari Fokus Belanja ke Fokus Pendapatan

Salah satu akar masalah rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dominasi budaya birokrasi yang lebih memprioritaskan serapan anggaran dibanding penciptaan nilai ekonomi. Dalam banyak kasus, keberhasilan OPD diukur dari besar kecilnya realisasi belanja, bukan dari sejauh mana belanja tersebut berdampak terhadap peningkatan penerimaan daerah. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan pergeseran budaya (cultural shift) di seluruh birokrasi pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota, dari pola pikir belanja sebagai prestasi, menuju pola pikir pendapatan sebagai capaian utama. Perubahan kultur ini dapat dimulai dari tahapan perencanaan. Semua OPD wajib menyusun kegiatan yang tidak hanya berorientasi output (misalnya: “terbangunnya 5 unit pasar”), tetapi juga outcome fiskal (misalnya: “peningkatan retribusi pasar sebesar Rp250 juta/tahun dari 5 pasar baru tersebut”). Dengan kata lain, OPD tidak cukup hanya menyelesaikan proyek, tetapi harus bisa membuktikan bahwa proyek tersebut menjadi mesin penerimaan baru bagi daerah.

Contoh nyata dapat dilihat pada Dinas Lingkungan Hidup, yang selama ini banyak terlibat dalam pembangunan ruang terbuka hijau. Pembangunan taman kota di Kawasan Sarilamak seharusnya tidak hanya menjadi kegiatan fisik semata. Sebaliknya, taman harus dirancang sebagai pusat aktivitas publik yang menghasilkan retribusi: seperti penyewaan booth UMKM, kerja sama penyediaan fasilitas food truck, retribusi parkir, dan penyewaan tempat untuk event. Maka, taman tidak sekadar mempercantik kota, tetapi juga menjadi sumber PAD yang aktif dan produktif.

Contoh lain berasal dari Dinas Pemuda dan Olahraga, yang memiliki aset GOR dan lapangan olahraga di berbagai kecamatan. Kultur lama hanya menghitung tingkat pemanfaatan sebagai keberhasilan. Namun dalam paradigma baru, setiap pemanfaatan aset harus dikonversi menjadi kontribusi fiskal: retribusi sewa lapangan untuk pertandingan, penyewaan gedung untuk acara publik, dan kolaborasi dengan komunitas olahraga yang menyeter iuran ke kas daerah.

Begitu juga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, yang bisa mengelola coworking space, layanan literasi digital, dan penyewaan ruang baca berbasis komunitas kreatif. Semua aktivitas tersebut bisa dikenakan biaya layanan secara wajar dan transparan, serta dimasukkan sebagai penerimaan sah daerah.

Sebagai bagian dari transformasi ini, penghargaan kinerja OPD perlu diperbarui: bukan hanya dari tingginya serapan, tetapi dari peningkatan kontribusi PAD sektor masing-masing. Misalnya, Dinas Pariwisata yang berhasil menaikkan pendapatan retribusi wisata sebesar 30% dibanding tahun sebelumnya, layak diberi insentif dan insentif kinerja yang lebih tinggi dibanding OPD dengan serapan tinggi tapi nol kontribusi fiskal.

Langkah ini juga perlu didukung melalui regulasi internal seperti Peraturan Bupati tentang Standar Kinerja Berbasis Fiskal yang mewajibkan seluruh OPD menyertakan komponen proyeksi PAD dalam Renja dan DPA-nya. Dengan kebijakan ini, perubahan kultur menjadi sistemik, bukan hanya himbauan normatif.

Kesimpulannya, perubahan kultur dari fokus belanja ke fokus pendapatan adalah fondasi menuju kemandirian fiskal. Ketika seluruh OPD melihat dirinya sebagai bagian dari mesin penghasil PAD, maka secara kolektif, Kabupaten Lima Puluh Kota akan lebih cepat keluar dari ketergantungan fiskal terhadap transfer pusat dan mampu mengembangkan pembangunan yang berbasis kekuatan lokalnya sendiri.

#### 1.d. Proposal Wajib Mengandung Estimasi PAD

Dalam paradigma peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terintegrasi, setiap usulan kegiatan—baik yang bersumber dari APBD, DAK pusat, dana tugas pembantuan, maupun hibah provinsi—harus menyertakan estimasi kontribusi terhadap pendapatan daerah. Artinya, setiap proposal yang diajukan ke dalam Musrenbang, Renja OPD, hingga RKPD, wajib tidak hanya menggambarkan aspek manfaat sosial atau infrastruktur semata, tetapi juga kalkulasi fiskal yang dihasilkan.

Langkah ini penting untuk membentuk budaya birokrasi yang fiscally-conscious, yaitu seluruh program kerja pemerintah didorong untuk tidak hanya membelanjakan anggaran tetapi juga menciptakan “jalan masuk uang” bagi daerah. Oleh karena itu, perlu diterapkan mekanisme baku bahwa proposal kegiatan tanpa komponen proyeksi PAD tidak dapat disetujui, kecuali untuk belanja wajib atau layanan dasar yang tidak bisa dipungut retribusi.

Contoh konkret:

Dinas Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota mengajukan proposal pengembangan lanjutan kawasan Lembah Harau dengan dana Rp3 miliar. Proposal tersebut wajib menyertakan estimasi PAD sebagai berikut:

- Target penambahan 50.000 pengunjung per tahun dari promosi dan peningkatan fasilitas.
- Retribusi masuk Rp10.000 per pengunjung x 50.000 = Rp500 juta/tahun.
- Retribusi parkir Rp5.000 x 20.000 kendaraan = Rp100 juta/tahun.
- Retribusi booth UMKM dan kios souvenir (50 unit x Rp200.000/bulan) = Rp120 juta/tahun.
- Total potensi PAD tahunan: Rp720 juta, atau Rp3,6 miliar dalam 5 tahun—lebih besar dari nilai belanja awal.

Contoh lainnya:

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan mengusulkan proyek pengembangan sawah organik murah di Kecamatan Gunuang Omeh dan Kecamatan Suliki. Maka, estimasi PAD-nya dapat dihitung dari:

- Sertifikasi sawah organik (100 ha x Rp250.000/sertifikat) = Rp25 juta.
- Hasil panen beras organik premium yang dipasarkan melalui koperasi, dikenai retribusi distribusi 2% dari omzet koperasi: Rp500 juta omzet x 2% = Rp10 juta.
- Penyewaan mesin pascapanen di STA Nagari = Rp5 juta/tahun.
- Total PAD dari proyek ini bisa mencapai Rp40 juta–Rp50 juta per musim tanam.

Demikian pula, Dinas Perhubungan mengajukan pembangunan kantong parkir di kawasan wisata Saribu Gonjong. Estimasi PAD wajib disertakan:

- Kapasitas parkir 80 kendaraan.
- Target 200 kendaraan/hari x Rp5.000 = Rp1 juta/hari.

- Operasional 250 hari = Rp250 juta/tahun PAD dari retribusi parkir.

Selain sektor pariwisata dan pertanian, hal ini juga berlaku untuk sektor non-tradisional seperti:

- Dinas Perpustakaan dan Arsip, jika mengusulkan coworking space digital untuk pelajar dan UMKM, wajib menyertakan estimasi retribusi penggunaan fasilitas.
- Dinas Kominfo, saat mengembangkan jaringan internet desa, harus menunjukkan potensi retribusi layanan atau pemanfaatan infrastruktur untuk kerja sama komersial dengan operator.

Agar ini berjalan efektif, Pemerintah Daerah perlu membuat format standar proposal pembangunan daerah yang mencantumkan:

1. Deskripsi kegiatan
2. Nilai anggaran
3. Estimasi dampak sosial dan ekonomi
4. Estimasi kontribusi PAD (langsung/tidak langsung, rutin/sesaat)
5. Proyeksi 3–5 tahun ke depan.

Manfaat dari kebijakan ini sangat strategis: proposal menjadi lebih berbobot, pengambil keputusan dapat menyusun prioritas berdasarkan cost-benefit, dan setiap rupiah yang dibelanjakan mengandung potensi pengembalian fiskal untuk masa depan daerah.

### 1.e. Screening Belanja Berbasis Efisiensi dan Dampak Fiskal

Dalam upaya mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menerapkan mekanisme screening atau penyaringan belanja berdasarkan efisiensi dan dampak fiskal. Screening ini berfungsi untuk menilai apakah setiap rencana belanja benar-benar berdampak terhadap peningkatan penerimaan daerah, menciptakan efisiensi belanja, atau sekurang-kurangnya meminimalkan kebocoran anggaran.

Pemerintah daerah tidak lagi cukup hanya menilai kelayakan kegiatan dari sisi administratif dan teknis. Semua pengeluaran—terutama belanja modal dan belanja barang/jasa yang bernilai besar—harus disertai analisis “return on expenditure”, yaitu apa nilai balik ekonomi dan fiskal yang akan diterima daerah. Belanja yang tidak memiliki proyeksi dampak ekonomi harus ditunda, dikaji ulang, atau dialihkan ke kegiatan yang lebih produktif.

Contoh konkret, dalam pengusulan pembangunan gapura nagari, pagar kantor camat, atau taman median jalan di lokasi yang tidak strategis, OPD harus menjelaskan kontribusi langsung atau tidak langsungnya terhadap PAD. Bila tidak ada, maka belanja tersebut sebaiknya tidak diprioritaskan. Sebaliknya, pembangunan Pasar Nagari di Kecamatan Mungka dengan sistem penyewaan lapak berbasis digital (QRIS), integrasi retribusi sampah, dan parkir jelas memiliki potensi pendapatan harian, dan harus didahulukan.

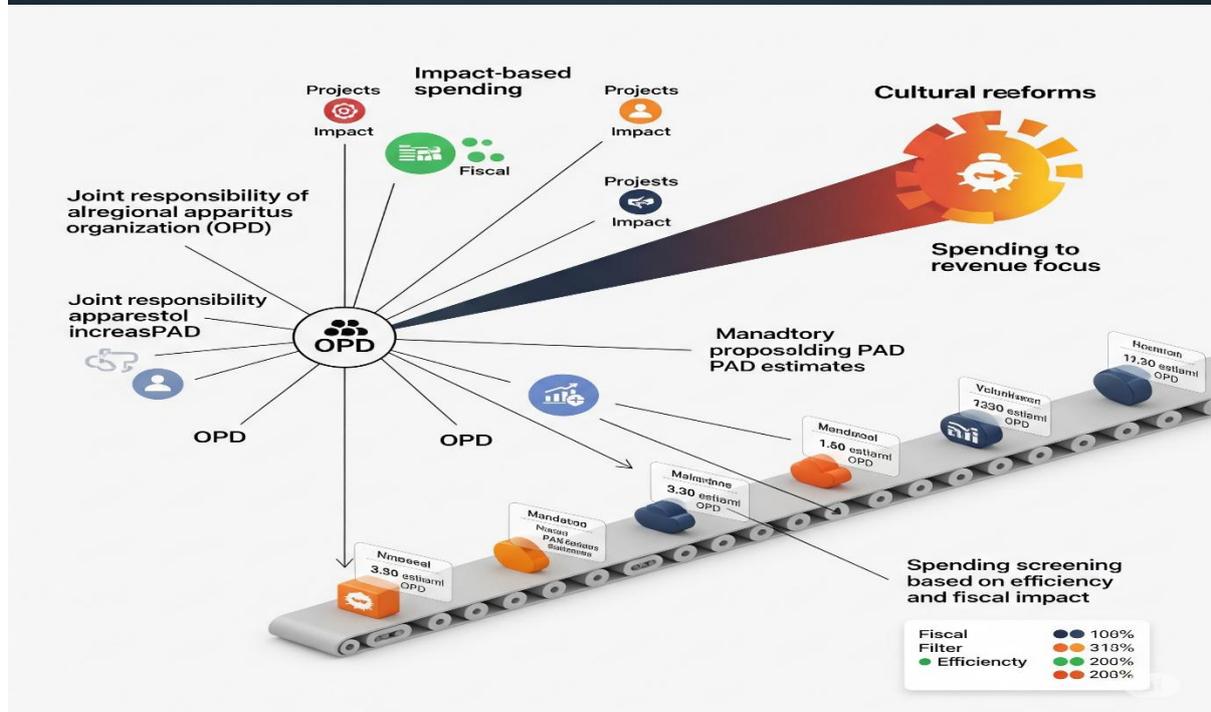
Contoh lain berasal dari Dinas Perhubungan, yang mengajukan pengadaan rambu-rambu dan marka jalan di kawasan wisata. Proyek ini harus disertai dengan proposal pengelolaan retribusi parkir resmi, pelibatan petugas penarik retribusi, serta sistem pengawasan berbasis QRIS. Tanpa itu, maka proyek hanya menghasilkan infrastruktur yang tidak mendatangkan pendapatan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang mengajukan pembangunan drainase atau trotoar juga perlu menjelaskan kontribusinya terhadap nilai ekonomi sekitar. Apabila infrastruktur tersebut dibangun di kawasan UMKM, maka harus ada rencana pemberdayaan dan pemetaan usaha di sekitar yang menjadi objek pajak atau retribusi baru.

Lebih jauh, Dinas Sosial yang sebelumnya hanya mengelola bansos dan pelatihan, kini wajib menyertakan output fiskal dalam usulan programnya. Contoh: pelatihan keterampilan menjahit atau produksi makanan untuk ibu rumah tangga di Nagari Situjuh harus dilanjutkan dengan fasilitasi pembentukan koperasi, pendaftaran NIB, dan pemasaran digital yang berujung pada kontribusi pajak UMKM atau sewa stand di event-event pemerintah.

Untuk menjalankan screening fiskal ini, TAPD dan Bappeda perlu menyusun formulir penilaian proposal kegiatan berbasis dampak PAD, yang harus diisi oleh OPD pengusul. Setiap kegiatan yang

tidak memenuhi nilai ambang fiskal tertentu (misalnya minimum 10% potensi pengembalian PAD dari total anggaran dalam 3 tahun) dapat dipending atau di-refocusing ke arah yang lebih produktif. Dengan demikian, screening belanja bukan sekadar kontrol anggaran, tetapi strategi utama membangun budaya produktif di birokrasi, memastikan bahwa semua pengeluaran daerah diarahkan untuk menciptakan kapasitas fiskal jangka panjang, kemandirian keuangan daerah, dan transformasi dari belanja konsumtif menjadi investasi fiskal yang nyata.



## BAB II

## DIGITALISASI PEMBAYARAN

## 2.a. QRIS Sebagai Instrumen Pembayaran PAD

Salah satu langkah paling cepat, konkret, dan berdampak besar dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah melalui digitalisasi sistem pembayaran menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). QRIS memungkinkan seluruh transaksi pendapatan—baik pajak maupun retribusi daerah—dilakukan secara nontunai, real-time, akurat, dan transparan, sekaligus meminimalisasi kebocoran yang kerap terjadi dalam sistem manual.

Implementasi QRIS dapat diterapkan secara menyeluruh di berbagai lini pendapatan daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, mulai dari PBB-P2, retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi wisata, hingga pemanfaatan aset daerah seperti penyewaan aula, lapangan, GOR, atau booth UMKM. Keunggulan QRIS bukan hanya pada kemudahan teknis, tetapi juga pada akuntabilitas fiskal karena setiap transaksi tercatat otomatis dan langsung masuk ke rekening kas daerah.

Contoh konkret penerapan QRIS di Kabupaten Lima Puluh Kota meliputi:

1. Pembayaran PBB-P2 di Kecamatan Harau dan Kecamatan Luak. Selama ini, pembayaran PBB-P2 dilakukan melalui kolektor desa atau kantor nagari. Dengan QRIS, wajib pajak cukup memindai kode melalui smartphone atau melalui warung mitra yang disediakan. Pembayaran otomatis tercatat di dashboard Bapenda dan menghindari keterlambatan maupun kebocoran.
2. Retribusi parkir di kawasan wisata Lembah Harau, Saribu Gonjong, dan Kapalo Banda Taram. Retribusi yang dulunya dilakukan secara manual oleh kelompok masyarakat atau jukir informal, kini dialihkan melalui titik-titik parkir digital dengan pemindaian QRIS pada palang masuk/keluar. Setiap kendaraan masuk dan membayar retribusi tercatat otomatis dan masuk ke kas daerah, sementara petugas hanya memandu, bukan menarik uang tunai.
3. Retribusi sewa kios dan lapak di Pasar Nagari Mungka dan Pasar Situjuh. Seluruh pedagang diberikan akun QRIS masing-masing, dan sistem sewa kios berjalan secara harian atau bulanan melalui QRIS. Setiap transaksi bisa dilacak, dan pemerintah daerah dapat membuat laporan rekapitulasi mingguan secara otomatis.
4. Retribusi pemanfaatan aula sekolah atau fasilitas olahraga milik Pemda. Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga dapat menerapkan QRIS untuk pembayaran pemakaian aula, lapangan voli, lapangan sepak bola, atau gedung serbaguna yang selama ini disewa secara informal. Ini memberikan kepastian pembayaran, dan hasilnya langsung masuk sebagai pendapatan sah daerah.

Sistem QRIS juga menghilangkan ketergantungan pada transaksi tunai, yang selama ini membuka celah penyimpangan, keterlambatan penyetoran, atau laporan tidak akurat. Dengan QRIS, proses pemungutan PAD menjadi lebih modern, efisien, inklusif, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, bahkan hingga tingkat nagari.

Ke depan, penerapan QRIS perlu difasilitasi oleh kerja sama yang kuat antara Pemda, Bank Nagari, dan penyedia teknologi keuangan (fintech). Pemerintah daerah dapat membuat program QRIS Masuk Nagari, yakni semua kantor nagari, objek wisata, pasar, sekolah, dan fasilitas umum dilengkapi dengan QRIS. Ini sekaligus mendorong literasi digital keuangan masyarakat dan memperkuat ekonomi digital daerah.

## Reformasi Strategis Pengelolaan Pendapatan Daerah



## Digitalisasi Pembayaran



### 2.b. Dashboard PAD Terintegrasi Real-Time

Transformasi digital dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak akan optimal tanpa adanya sistem dashboard terintegrasi yang bekerja secara real-time. Dashboard ini berfungsi sebagai pusat kendali informasi keuangan daerah, memantau pergerakan penerimaan dari seluruh sumber PAD secara harian, mingguan, bulanan, dan tahunan—hingga level nagari dan OPD pengelola. Melalui dashboard ini, Bupati, Sekda, TAPD, dan DPRD dapat mengakses dan menganalisis kondisi keuangan daerah dengan satu klik, dan mengambil keputusan secara cepat dan berbasis data.

Fitur utama Dashboard PAD yang disarankan untuk Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain:

1. Pemetaan Harian Penerimaan per OPD dan Jenis Penerimaan  
Setiap transaksi PAD—baik dari PBB-P2, pajak restoran, retribusi pasar, parkir, atau sewa fasilitas daerah—langsung tercatat dalam sistem dan tampil di dashboard sesuai waktu transaksi. OPD yang bertanggung jawab bisa langsung dilacak performanya.
2. Rasio Target vs Realisasi  
Setiap bulan, sistem otomatis menghitung berapa persen target PAD yang sudah tercapai per jenis pajak/retribusi. Jika di pertengahan bulan realisasi baru 25%, sementara target adalah 50%, maka sistem memberikan “peringatan kuning” kepada OPD pengelola.
3. Notifikasi OPD Tidak Aktif  
Jika dalam 3–7 hari tidak ada pemasukan dari satu OPD yang seharusnya aktif (misalnya Dinas Pariwisata di musim libur), sistem akan menandai dan mengirimkan notifikasi kepada Inspektorat, Bappeda, dan Sekda untuk ditindaklanjuti.
4. Peta Interaktif Penerimaan per Kecamatan dan Nagari  
Dashboard bisa menampilkan peta Kabupaten Lima Puluh Kota dengan gradien warna berdasarkan tinggi-rendahnya PAD yang dihasilkan dari masing-masing nagari atau kecamatan. Misalnya, Kecamatan Harau, Luak, dan Mungka yang memiliki sektor ekonomi aktif akan tampak lebih terang dibanding kecamatan lain yang belum optimal.
5. Forecasting dan Perbandingan Historis  
Sistem dapat memberikan prediksi tren penerimaan bulan berikutnya berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya, serta membandingkan data historis per tahun atau per OPD.

Contoh Penerapan Nyata:

1. Dinas Pariwisata mengelola retribusi masuk Lembah Harau dan Saribu Gonjong. Setiap transaksi QRIS dari tiket masuk dan parkir langsung tercatat di dashboard. Jika pada libur,

panjang penerimaan justru menurun, sistem menandai dan memberi sinyal ke kepala daerah untuk menelusuri apakah ada masalah teknis di lapangan (akses ditutup, petugas tidak aktif, dsb.).

2. Dinas Koperasi dan UKM yang mengelola pasar di Pasar Nagari Mungka dapat dipantau berdasarkan total transaksi QRIS dari kios-kios. Jika terjadi penurunan pembayaran sewa dari pedagang, sistem bisa menunjukkan kios mana yang macet dan petugas mana yang bertanggung jawab.
3. Dinas Perikanan yang mengelola retribusi penyewaan alat pascapanen di Kecamatan Gugauk atau Suliki dapat melaporkan berapa kali alat digunakan, siapa pengguna, dan berapa besar pendapatan masuk, langsung ke dashboard.

#### Manfaat Strategis Dashboard Real-Time:

1. **Transparansi:** Semua pihak—pimpinan, OPD, bahkan masyarakat jika dibuka sebagian secara publik—dapat melihat kondisi PAD dengan nyata.
2. **Responsif:** Jika ada kebocoran atau penurunan penerimaan, dapat diidentifikasi dalam hitungan jam atau hari, bukan bulan.
3. **Akuntabilitas:** Kepala OPD tidak bisa lagi beralasan soal keterlambatan atau ketidaktahuan, karena semua data terbuka dan terintegrasi.
4. **Insentif Berbasis Kinerja:** OPD dan nagari yang mencapai atau melampaui target PAD bisa diberi reward, karena datanya terekam jelas dan obyektif.

#### 2.c. Sistem Integrasi Pelayanan dan Pembayaran Digital Lintas OPD

Digitalisasi PAD tidak hanya berhenti pada metode pembayaran seperti QRIS atau pelaporan real-time, tetapi harus dikembangkan ke tahap selanjutnya: integrasi sistem pelayanan publik lintas OPD dalam satu platform digital terpadu. Integrasi ini memungkinkan masyarakat, pelaku usaha, maupun investor untuk mengakses semua layanan publik—baik administratif maupun komersial—dalam satu akun daring yang mudah, cepat, dan aman. Di sisi lain, pemerintah daerah memperoleh manfaat berupa efisiensi pelayanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta peningkatan PAD dari berbagai sektor yang selama ini tersebar dan dikelola secara manual.

Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, platform ini dapat dirancang dengan nama “SakatoPay”, sebagai super-app atau portal utama digital pelayanan dan pembayaran daerah. Portal ini menjadi titik sentral interaksi masyarakat dengan seluruh OPD, dan semua pembayaran dilakukan melalui satu sistem QRIS terhubung dengan dashboard PAD terintegrasi.

Fitur utama yang dapat disediakan dalam SakatoPay antara lain:

1. **Layanan PBB-P2 dan Pajak Daerah**  
Masyarakat dapat mengecek tagihan PBB berdasarkan NOP dan membayar langsung melalui QRIS. Untuk pelaku usaha, aplikasi ini juga menyediakan menu pembayaran pajak restoran, reklame, hiburan, dan pajak air bawah tanah. Sistem akan otomatis menyimpan riwayat pembayaran dan mengeluarkan bukti resmi.
2. **Pelayanan Perizinan dan Retribusi Usaha**  
Pelaku UMKM dapat mengurus izin usaha mikro, memperpanjang izin, serta membayar retribusi lokasi usaha (sewa kios, stand bazar, dsb) langsung melalui SakatoPay. Ini dapat menggantikan proses manual di Dinas PMPTSP yang selama ini kerap memakan waktu dan membuka potensi pungutan liar.
3. **Sewa Fasilitas dan Aset Daerah**  
Seluruh penyewaan fasilitas publik seperti aula, GOR, lapangan sepak bola, panggung budaya, mobil operasional, dan alat pertanian bisa dipesan secara digital melalui SakatoPay. Pemesan tinggal memilih tanggal, waktu, jenis fasilitas, dan membayar melalui QRIS yang langsung masuk ke kas daerah.
4. **Pendaftaran dan Pembayaran Layanan Wisata**

Wisatawan dapat memesan tiket masuk ke Lembah Harau, Saribu Gonjong, dan objek wisata lainnya, termasuk paket wisata dan parkir, melalui aplikasi. Tiket berbentuk e-ticket yang bisa diverifikasi di pintu masuk oleh petugas dengan scanner.

5. Laporan dan Pengaduan Wajib Pajak  
Masyarakat yang merasa ada tagihan ganda, pelayanan lambat, atau kebocoran pajak di lapangan dapat melaporkan langsung di aplikasi. Laporan ini masuk ke Dinas terkait dan tercatat dalam sistem sebagai dasar evaluasi.
6. Sistem Notifikasi dan Pengingat Otomatis  
SakatoPay dapat mengirim pengingat jatuh tempo PBB, pajak restoran bulanan, atau retribusi sewa kios secara otomatis via SMS, WhatsApp, dan email, sehingga kepatuhan meningkat.

Contoh Implementasi di Lima Puluh Kota:

- Seorang pedagang di Pasar Nagari Taeh Baruah membuka aplikasi SakatoPay, membayar retribusi harian sebesar Rp5.000 via QRIS, dan langsung mendapatkan e-bukti. Sistem mengupdate dashboard PAD secara otomatis.
- Warga Nagari Situjuh Limo Nagari yang ingin menyewa lapangan bola untuk turnamen pemuda cukup masuk ke SakatoPay, pilih fasilitas, bayar via QRIS, dan gunakan kode bukti untuk akses hari-H.
- Pelaku UMKM di Kecamatan Guguk mengakses perizinan dan membayar retribusi distribusi produk secara digital, tanpa harus ke kantor dinas.

Manfaat Strategis Sistem Terpadu:

1. Kemudahan dan Kenyamanan untuk Masyarakat – Semua layanan dan pembayaran dalam satu pintu.
2. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak – Dengan sistem yang mudah dan notifikasi otomatis, partisipasi warga meningkat.
3. Efisiensi Birokrasi – Beban layanan di kantor OPD berkurang, SDM bisa difokuskan untuk peningkatan layanan substantif.
4. Peningkatan PAD – Seluruh retribusi dan pajak kecil yang tersebar bisa dihimpun akurat dan transparan.
5. Meningkatkan Kepercayaan Publik – Karena sistem menciptakan transparansi dan mengurangi potensi korupsi/pungli.

## 2.d. Insentif dan Sanksi Digital

Agar digitalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berjalan efektif, tidak cukup hanya mengandalkan teknologi dan sistem—perlu ditopang oleh kebijakan insentif dan sanksi yang mendorong kepatuhan, partisipasi, dan inovasi baik dari sisi masyarakat maupun dari internal OPD. Insentif diberikan kepada pelaku atau OPD yang mendukung percepatan digitalisasi PAD, sementara sanksi diterapkan kepada yang lalai, enggan bertransformasi, atau bahkan menghambat proses digitalisasi.

### A. Insentif Berbasis Kepatuhan dan Kinerja Digital

1. Untuk Wajib Pajak dan Masyarakat:

- Diskon PBB-P2 hingga 10% untuk pembayaran sebelum batas waktu tertentu melalui QRIS.
- Reward loyalitas bagi pelaku usaha yang konsisten membayar pajak/retribusi tepat waktu selama 3 tahun berturut-turut, seperti: piagam, promosi gratis di website Pemda, atau bebas retribusi selama bulan tertentu.
- Undian digital berkala bagi masyarakat yang menggunakan QRIS dalam membayar pajak atau retribusi, dengan hadiah berupa voucher belanja UMKM, paket wisata gratis, atau produk lokal.

## 2. Untuk Nagari:

- Dana Insentif Nagari Digital bagi nagari yang berhasil meningkatkan penerimaan PBB-P2, retribusi wisata, atau sewa fasilitas melalui sistem QRIS.
- Peringkat “Nagari Cerdas Fiskal” diterbitkan setiap tahun berdasarkan kinerja penerimaan digital dan dilombakan antarnagari sebagai bagian dari evaluasi kinerja wali nagari.

## 3. Untuk OPD:

- Tambahan Dana Operasional OPD yang menunjukkan peningkatan signifikan PAD melalui sistem digital (target pertumbuhan misalnya >15% dari tahun sebelumnya).
- Penghargaan Kepala OPD Terinovatif dalam digitalisasi PAD, diberikan dalam acara tahunan Pemkab atau HUT Daerah.

**B. Sanksi bagi Ketidaksungguhan dalam Digitalisasi PAD**

## 1. Untuk OPD:

- Rekomendasi pemotongan anggaran operasional tahun berikutnya bagi OPD yang tidak mencapai target digitalisasi transaksi (>80% transaksi PAD masih tunai).
- Monitoring Khusus oleh Inspektorat bagi OPD yang enggan menerapkan sistem QRIS atau dashboard PAD dan tidak membuat rencana akselerasi.
- Larangan mengusulkan belanja baru jika sistem penerimaan masih manual dan tidak ada roadmap digitalisasi dalam dokumen perencanaan OPD.

## 2. Untuk Pengelola Aset/Unit Layanan Daerah:

- Pemutusan kewenangan pengelolaan sementara jika dalam audit ditemukan ketidakterbukaan penerimaan (misalnya sewa lapangan, retribusi parkir, dll) karena tidak menggunakan kanal resmi digital.
- Evaluasi dan rotasi petugas lapangan yang terbukti menghambat penggunaan QRIS, baik karena tidak memberi edukasi, maupun karena menyalahgunakan sistem tunai.

**Contoh Penerapan di Kabupaten Lima Puluh Kota:**

- Nagari Harau berhasil mencapai 100% pembayaran retribusi parkir wisata melalui QRIS, dan menerima Dana Insentif Nagari sebesar Rp150 juta pada tahun anggaran berikutnya untuk pengembangan UMKM.
- Dinas Perikanan menunjukkan peningkatan retribusi sewa alat pascapanen sebesar 30% sejak digitalisasi; mendapatkan penghargaan “OPD Pendorong PAD Terbaik”.
- Sebaliknya, Dinas Koperasi dan UKM yang tidak menerapkan sistem QRIS di pasar binaannya di Pasar Situjuah dan Mungka, dikenai rekomendasi refocusing anggaran sebesar 10% untuk pelatihan digitalisasi wajib pada seluruh petugas pasar.

**2.e. Trigger Dividen untuk Semua BUMD sebagai Instrumen Digitalisasi PAD dan Efisiensi Fiskal**

Dalam konteks digitalisasi pendapatan daerah dan efisiensi fiskal, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu diperjelas dan diperkuat, khususnya sebagai trigger atau pemicu peningkatan PAD melalui pembagian dividen yang konsisten dan terukur. Selama ini, keberadaan BUMD di banyak daerah belum memberikan kontribusi signifikan terhadap kas daerah, padahal potensi ekonomi yang dikelola sangat besar. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menetapkan kebijakan target dividen tahunan wajib bagi setiap BUMD dan unit usaha daerah sebagai bagian dari sistem digitalisasi PAD berbasis kinerja.

Langkah ini dimulai dengan penetapan besaran dividen minimal yang harus disetor BUMD ke kas daerah, misalnya 10–25% dari laba bersih. Target ini harus dimasukkan dalam Rencana Bisnis (Business Plan) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BUMD yang setiap tahunnya disetujui oleh kepala daerah dan DPRD. Agar target ini terpantau secara efektif, maka sistem pelaporan dan penyetoran dividen harus dilakukan melalui dashboard PAD digital yang terintegrasi dengan sistem keuangan daerah.

Contoh penerapan:

- BUMD Logistik dan Agribisnis yang mengelola gudang dan penyimpanan hasil pertanian di Kapur IX, Suliki, dan Guguak ditargetkan menyetor dividen Rp500 juta per tahun ke kas daerah.
- BUMD Wisata Harau Raya yang mengelola kawasan Lembah Harau harus menyetor 20% dari laba bersih hasil retribusi parkir, tiket masuk, dan pemanfaatan booth wisata ke PAD melalui QRIS dan dashboard digital.
- BUMD Pangan dan Perdagangan yang bekerjasama dengan koperasi Merah Putih atau distributor regional wajib menyetor dividen tahunan berbasis persentase per sektor dagang.

Untuk menghindari pemborosan dan inefisiensi, setiap BUMD juga diwajibkan menyampaikan laporan digital bulanan dan realisasi penjualan/retribusi secara live ke dashboard Pemda, yang bisa dimonitor oleh TAPD dan Badan Pengelola Keuangan Daerah. BUMD yang tidak menyetor dividen dalam dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang valid harus diaudit menyeluruh dan dirombak manajemen serta model bisnisnya.

Selain itu, sistem pemberian insentif bagi manajemen BUMD bisa dihubungkan langsung dengan capaian dividen. Manajemen yang berhasil menyetor dividen lebih tinggi dari target akan mendapatkan bonus sesuai aturan dan menjadi teladan digitalisasi PAD di sektor BUMD.

## 2.f. Interkoneksi Sistem Pembayaran PAD Antar-OPD dan Nagari

Agar digitalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) benar-benar terakselerasi secara merata dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu membangun interkoneksi sistem pembayaran dan pelaporan PAD antara OPD dan nagari. Artinya, semua kanal penerimaan daerah—baik yang dipungut oleh OPD kabupaten maupun unit layanan nagari—harus berada dalam satu ekosistem digital yang saling terhubung, seragam, dan dapat dipantau secara real-time dari pusat data fiskal daerah.

Prinsip Interkoneksi:

- Satu QRIS – Multi Fungsi: Satu QRIS digunakan untuk semua jenis pembayaran PAD, baik retribusi parkir, PBB-P2, tiket wisata, hingga sewa fasilitas nagari.
- Satu Dashboard – Multi Level: Semua data transaksi dari OPD dan nagari langsung masuk ke dashboard PAD kabupaten, dan dapat difilter per OPD, kecamatan, dan nagari.
- Satu Integrasi – Multi Stakeholder: Sistem terhubung dengan Bank Nagari, Bapenda, Dinas Kominfo, Inspektorat, dan Badan Keuangan Daerah.

Manfaat Strategis Interkoneksi Sistem PAD:

1. Efisiensi Administrasi: Masyarakat tidak perlu mengunduh banyak aplikasi atau datang ke banyak kantor. Semua pembayaran bisa dilakukan melalui satu kanal digital resmi daerah.
2. Transparansi Lintas OPD dan Nagari: Semua penerimaan terekam dan terstandarisasi. Tidak ada lagi praktik 'khas' pungutan antar OPD atau perbedaan tarif yang tidak sesuai regulasi.
3. Peningkatan Kepercayaan Publik: Sistem yang seragam akan menumbuhkan persepsi keadilan dan kejelasan dalam pembayaran pajak/retribusi.

Contoh Penerapan di Lima Puluh Kota:

- QRIS PAD Lima Puluh Kota digunakan oleh Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan, dan Nagari Harau untuk menarik retribusi secara bersama-sama di satu kawasan wisata.
- Nagari Taram dan Nagari Situjuh Limo Nagari menerapkan sistem retribusi pasar, parkir, dan sampah dengan satu QRIS terdaftar atas nama Pemkab, yang hasilnya dipisahkan otomatis berdasarkan kode transaksi dan penyetor.

- Kegiatan Bazar UMKM Nagari melibatkan Disperindag dan Dinas Koperasi, di mana sewa stand, izin usaha, dan retribusi kebersihan dibayar melalui satu tautan QR digital yang dikontrol bersama.

#### Instrumen Pendukung Interkoneksi:

- Peraturan Bupati tentang Standar Sistem Pembayaran PAD: Semua OPD dan nagari wajib menggunakan sistem terintegrasi dan dilarang menarik tunai tanpa otorisasi khusus.
- Helpdesk dan Audit Digital Berkala: Disediakan oleh Dinas Kominfo dan BPKD untuk mendampingi dan memverifikasi integrasi sistem serta memastikan tidak ada “rekening liar” di lapangan.

#### 2.g. Insentif Berbasis Kinerja Digital untuk OPD dan Nagari

Untuk memperkuat implementasi sistem digitalisasi PAD, perlu disiapkan mekanisme insentif berbasis kinerja digital bagi OPD dan nagari yang menunjukkan capaian unggul dalam pemanfaatan teknologi fiskal. Insentif ini tidak hanya mendorong peningkatan penerimaan, tetapi juga mempercepat transformasi budaya kerja dari manual ke digital, serta memperkuat motivasi birokrasi lokal untuk lebih adaptif terhadap inovasi.

#### Tujuan Pemberian Insentif:

1. Meningkatkan akuntabilitas fiskal berbasis data.
2. Mempercepat adopsi sistem pembayaran digital dan dashboard monitoring.
3. Mendorong kompetisi sehat antar OPD dan nagari.
4. Menumbuhkan ekosistem kinerja fiskal yang partisipatif dan terukur.

#### Bentuk Insentif untuk OPD dan Nagari:

##### A. Insentif untuk OPD:

- Tambahan Belanja Operasional (BO) maksimal 5–10% untuk OPD yang realisasi PAD digital >100% target.
- Prioritas belanja modal tahun berikutnya bagi OPD yang menyumbang pertumbuhan PAD tertinggi melalui kanal digital.
- Penghargaan Tahunan Kepala OPD Pendorong PAD Digital Terbaik, diumumkan dalam Rakor PAD Kabupaten.

##### B. Insentif untuk Nagari:

- Dana Insentif Nagari Digital (DINDI) diberikan bagi nagari dengan capaian QRIS tertinggi dan pelaporan fiskal digital tepat waktu.
- Akses prioritas pada program inkubasi UMKM, pelatihan digital, dan promosi wisata berbasis nagari.
- Peringkat tahunan “Nagari Cerdas Fiskal” diterbitkan dan digunakan sebagai referensi pengalokasian bantuan keuangan daerah.

#### Kriteria Penilaian Kinerja Digital:

Indikator	Bobot (%)
Persentase transaksi PAD melalui QRIS	30%
Ketepatan waktu pelaporan realisasi PAD	20%
Inovasi digitalisasi layanan dan retribusi	25%
Peningkatan jumlah wajib pajak aktif digital	15%
Efisiensi pemungutan dan pelaporan	10%

**Contoh Implementasi:**

- Dinas Perhubungan yang berhasil mengalihkan seluruh retribusi parkir wisata ke QRIS dan menyumbang 130% dari target, mendapatkan tambahan anggaran operasional Rp150 juta tahun berikutnya.
- Nagari Koto Baru Simalanggang dengan capaian realisasi QRIS PBB-P2 tertinggi dan pelaporan mingguan tanpa delay, memperoleh insentif DINDI senilai Rp200 juta untuk pengembangan bank sampah digital.
- Dinas Koperasi dan UKM mendapat insentif pelatihan digital nasional karena sukses mengintegrasikan QRIS di 3 pasar nagari dan mendorong pencatatan izin usaha melalui aplikasi.

**2.h. Audit Digital dan Penegakan Kepatuhan Fiskal Berbasis Teknologi**

Digitalisasi PAD tidak akan mencapai tujuan apabila tidak diiringi dengan mekanisme pengawasan dan penegakan kepatuhan yang adaptif terhadap sistem baru. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menetapkan pendekatan baru berupa audit digital berkala dan penegakan fiskal berbasis sistem, untuk memastikan integritas, akurasi, dan keberlanjutan dari semua kanal digital PAD.

**Komponen Audit Digital dan Kepatuhan:****1. Audit Sistem dan Transaksi Digital:**

- Dilakukan oleh Inspektorat dan BPKAD minimal setiap triwulan.
- Meliputi: ketepatan input transaksi, konsistensi nominal retribusi/pajak, kesesuaian waktu setor QRIS, dan keutuhan integrasi ke dashboard PAD.
- Audit mencakup sistem yang digunakan OPD, nagari, dan mitra eksternal (BUMD, koperasi, pihak ketiga penyedia jasa).

**2. Penelusuran Jejak Digital dan Deteksi Penyimpangan:**

- Setiap transaksi QRIS otomatis merekam metadata (lokasi, waktu, OPD/Nagari, user).
- Sistem dapat mengidentifikasi anomali seperti jeda lama antara transaksi dan setoran, pembayaran ganda, atau transaksi tunai di kanal digital.
- Jika ditemukan penyimpangan, sistem memberi alert otomatis ke Inspektorat dan BPKAD.

**3. Pengawasan QRIS dan Kanal Penerimaan Resmi:**

- Semua kanal penerimaan PAD harus terdaftar dan tersertifikasi resmi di dashboard QRIS PAD Kabupaten.
- Penggunaan QRIS pribadi, pihak ketiga tak terdaftar, atau rekening luar sistem akan dikenakan sanksi tegas administratif dan hukum.

**Sanksi dan Tindak Lanjut:****Untuk OPD dan Nagari:**

- Pemotongan dana operasional bagi OPD yang sistemnya tidak terhubung atau ditemukan ketidaksesuaian pelaporan.
- Penundaan pencairan transfer dana ke nagari yang tidak menyampaikan data realisasi QRIS atau melakukan transaksi tunai ilegal.
- Rekomendasi rotasi atau pemberhentian pejabat penanggung jawab PAD yang menghambat sistem digital atau tidak memenuhi standar kepatuhan.

**Untuk Pihak Ketiga dan Mitra BUMD:**

- Pemutusan kontrak jika menggunakan sistem keuangan di luar ketentuan Pemda.



- Kewajiban pengembalian penerimaan jika terbukti menyimpan atau menahan dana yang seharusnya masuk QRIS resmi daerah.

#### **Penguatan Kelembagaan Audit Digital:**

- Pembentukan Tim Audit Digital PAD lintas OPD: BPKAD, Inspektorat, Dinas Kominfo, dan TAPD.
- Pelatihan intensif dan sertifikasi petugas fiskal digital.
- Integrasi dengan Komisi Informasi Daerah dan Ombudsman untuk pengawasan publik terhadap transparansi penerimaan.

#### **2.i. Pengembangan Ekosistem QRIS Ekspansi ke Sektor Non-Tradisional**

Setelah sistem QRIS diimplementasikan pada sektor-sektor konvensional seperti PBB-P2, retribusi pasar, dan parkir, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu memperluas ekosistem QRIS ke sektor-sektor non-tradisional. Ini mencakup kegiatan ekonomi yang sebelumnya tidak dianggap sebagai sumber PAD langsung, tetapi memiliki potensi besar bila diintegrasikan secara sistematis dalam sistem penerimaan digital daerah.

#### **Sektor Non-Tradisional yang Siap Dimasukkan ke Sistem QRIS:**

##### 1. Event Komunitas dan Festival Budaya Nagari

- Penerapan QRIS untuk tiket masuk, booth kuliner, donasi acara, dan penjualan produk oleh UMKM lokal.
- Contoh: Festival Lembah Harau, Pesta Budaya Nagari Taeh, lomba pacu jawi lokal.

##### 2. Retribusi Pemanfaatan Aset Sosial Budaya

- Sewa balai adat, aula nagari, lapangan olahraga, panggung terbuka nagari, bisa dibayar via QRIS.
- Seluruh transaksi terpantau dalam dashboard PAD secara harian.

##### 3. Retribusi Komersialisasi Warisan Budaya dan Merek Lokal

- Produk-produk bermerek daerah (seperti “Kopi Harau”, “Gambir Kapur IX”, “Kerajinan Situjuh”) yang dilisensikan untuk digunakan oleh UMKM atau dipasarkan melalui platform nasional dapat dikenakan retribusi lisensi via QRIS.
- Mekanisme ini berlaku sebagai sistem bagi hasil.

##### 4. Jasa Pemerintah Lainnya Berbasis Pelayanan Langsung

- Pembayaran untuk legalisasi dokumen, administrasi layanan pertanian, penyewaan alat produksi, atau pelatihan masyarakat.
- Contoh: Dinas Pertanian menyewakan alat panen padi, dibayar via QRIS, terekam otomatis.

#### **Manfaat Pengembangan Ekosistem QRIS Non-Tradisional:**

- Meningkatkan volume dan varian transaksi digital PAD.
- Mengubah kegiatan informal menjadi formal dan terpantau.
- Mempermudah partisipasi masyarakat dalam pembangunan fiskal.
- Memperluas pelibatan generasi muda dan komunitas lokal dalam ekonomi digital.

#### **Contoh Implementasi:**

- Festival Harau 2026 menerapkan sistem QRIS untuk semua booth, parkir, dan tiket pertunjukan. Data transaksi diolah untuk menentukan potensi retribusi tahunan pariwisata dan UMKM.
- Balai Nagari Gunuang Omeh disewakan untuk acara pernikahan dan kegiatan sosial—semua transaksi dilakukan via satu QRIS dan hasilnya masuk ke kas nagari, tercatat dalam sistem kabupaten.

- Program pelatihan petani milenial oleh Dinas Pertanian dan BUMD disertai pembayaran retribusi registrasi via QRIS, dan peserta langsung tercatat dalam sistem pelatihan resmi.

## 2.j. Sistem Reward QRIS Nagari dan UMKM untuk Meningkatkan Literasi Digital Fiskal

Digitalisasi PAD tidak hanya membutuhkan infrastruktur dan regulasi, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha, khususnya UMKM dan komunitas nagari. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mengembangkan sistem reward (penghargaan dan insentif) berbasis penggunaan QRIS dan kepatuhan fiskal digital, agar tercipta semangat kolektif menuju tata kelola penerimaan daerah yang modern dan inklusif.

### Tujuan Pengembangan Sistem Reward QRIS:

1. Meningkatkan literasi digital fiskal masyarakat nagari.
2. Mendorong UMKM untuk masuk ke dalam sistem formal dan teregister.
3. Menumbuhkan budaya membayar pajak dan retribusi secara sukarela.
4. Memperkuat pelibatan generasi muda nagari dalam pengelolaan keuangan daerah.

### Bentuk Reward untuk UMKM dan Nagari:

#### A. Untuk UMKM:

- Reward Transaksi QRIS Tertinggi per Bulan berupa subsidi ongkir, promosi digital gratis dari Pemda, atau akses ke bazar resmi pemerintah.
- Label “UMKM Tertib Pajak Digital” yang dapat dipasang di toko/kios dan memberi nilai tambah dalam branding mereka.
- Prioritas program pelatihan dan bantuan modal untuk UMKM yang menggunakan QRIS sebagai kanal utama pembayaran dan teregister di dashboard PAD.

#### B. Untuk Nagari:

- Nagari dengan Pertumbuhan QRIS Tertinggi diberikan Dana Insentif Nagari (DINDI) untuk program prioritas (misal: digitalisasi pertanian, pelatihan konten digital, koperasi pemuda).
- Penghargaan tahunan “Nagari Digital Cerdas Fiskal” diberikan kepada nagari dengan akumulasi transaksi QRIS tertinggi dan pelaporan PAD digital paling konsisten.
- Kolaborasi khusus dengan Bank Nagari atau fintech lokal untuk menyediakan alat scan QRIS gratis dan pelatihan rutin.

### Contoh Implementasi:

- Di Nagari Guguk VIII Koto, 80% UMKM kuliner sudah menggunakan QRIS dan tercatat dalam dashboard Pemkab. Dalam 1 tahun, nagari ini menerima insentif digital Rp250 juta dan menjadi model pelatihan nasional.
- Nagari Taeh Baruah membentuk komunitas pemuda “QR Warriors” yang bertugas mengenalkan QRIS ke seluruh warung kecil dan pedagang keliling, dan mendapat penghargaan inovasi fiskal dari Bappeda.
- UMKM pengolahan gambir di Kapur IX yang rutin menggunakan QRIS untuk transaksi dan menyetor pajak usaha bulanan secara digital diberi promosi gratis pada Festival Lima Puluh Kota.

### Sarana Pendukung Reward Sistem QRIS:

- Dashboard Reward QRIS di website resmi Pemda.
- Kolom peringkat mingguan dan bulanan per nagari dan pelaku usaha.
- API yang menghubungkan sistem QRIS Bank Nagari dengan dashboard fiskal daerah.

## QRIS Sigitalissi Pembayaran untuk Pendapatan PAD Utama

**Dashboard PAD**

**Sistem integrasi pelayanan dan Digital Lintas seluruh BUMD**

**Trigger Dividen untuk instrumen pembayaran digitas OPD OPD dan fikal dan efisiensi Fiskal**

**Interkoneksi System pembayaran PAD OPD dan OPD antari nagari metunjuli Alisensi Fiskal**

**Pengembangan QRIS eksistinga penegakan kepatuhan fiskal irgor Non-tradisional**

**Insentif dan Sanksi Digital**

- Alimail dan Nagari
- Grafis intensi Alirton dana

**Audit berbasis kinerja digital**

- Insentif kinerja digital urwakili

**Sistem Reward QRIS**

- audia interasif animasi

**Sektor & UMKM**

- sektor sektor tercakup

## Digitalisasi pembayaran untuk pendapatan daerah

QRIS sebagai instrumen pembayaran PAD

Dashboard PAD terintegrasi real-Time

Sistem integrasi pelayana dan pembay digital lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Insentif serta Sanksi Digital

Dashboard PAD pembayaran PAD

Trigger Diviten jutat untuk seluai Usaha Milik Daerah (BeerD) (BUMD)

Interkoneksi sistem pembayaran PAD PAn efisiensi fiskal

Interkoneksi sistem pembayaran PAD untuk OPD dan nagari

Audit digital dan penegakan kenegaikan kepatuhan le sektor non-teknologi

Insentif berbasis PPD OPD Nagari

Pengembangan QRIS PRIS Ekpan-tradissionai untuk meningkatkan literasi digital fiskal

Insentif berbasis digital untuk OPD dan nagari menggambarkan

Sistem Reward QRIS

Sistem Reward QRIS Nagari UMKM

Sisten dierasi perahi cerial

## BAB III

### MONETISASI ASET DAERAH (BERWUJUD DAN TAK BERWUJUD)

Monetisasi aset merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum dioptimalkan. Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki beragam aset—baik berwujud seperti tanah, bangunan, gudang, pasar, dan alat produksi, maupun tak berwujud seperti data, merek lokal, warisan budaya, potensi karbon, dan reputasi geoekonomi. Melalui skema monetisasi, aset-aset tersebut bisa dijadikan sumber pendapatan rutin yang sah dan berkelanjutan.

#### 3.a. Monetisasi Aset Berwujud Melalui Pola Inbreng

Aset fisik seperti lahan kosong, pasar, terminal, gudang, atau bangunan milik pemerintah daerah bisa dimonetisasi dengan cara menyertakannya ke dalam BUMD sebagai penyertaan modal non-tunai (inbreng). Pola ini memungkinkan Pemda memiliki saham mayoritas (minimal 51%) pada usaha strategis yang digerakkan bersama mitra swasta, tanpa mengeluarkan dana segar dari APBD. Dengan cara ini, aset daerah menjadi produktif dan menyumbang dividen ke kas daerah.

Contoh penerapan:

- Lahan bekas terminal di Kecamatan Mungka dijadikan modal inbreng dalam BUMD Logistik dan dikerjasamakan dengan investor swasta untuk membangun storage dan cold storage hasil pertanian, seperti cabe, manggis, dan hasil ternak unggas. Hasil retribusi penyimpanan produk menjadi sumber PAD.
- Pasar Sarilamak direvitalisasi dengan sistem kemitraan BOT (Build Operate Transfer), di mana pihak ketiga membangun dan mengelola pasar selama 10 tahun dengan kewajiban menyeter retribusi dan bagi hasil pendapatan ke Pemda.
- Dealer mobil/alat berat bisa dibangun di atas lahan milik Pemda dengan sistem inbreng 51% kepada BUMD Perdagangan. Unit ini melayani sektor pertanian dan perkebunan yang membutuhkan alat berat, sekaligus menghasilkan pendapatan dari komisi penjualan dan sewa alat.

#### 3.b. Monetisasi Aset Tak Berwujud

Selain aset fisik, daerah memiliki banyak aset tidak berwujud yang belum tergarap maksimal. Ini termasuk:

1. Data konsumen dan basis produksi di nagari-nagari: digunakan sebagai modal kerja sama dengan e-commerce, fintech, dan distributor pupuk/benih.
2. Identitas budaya dan geo-ekonomi: Branding Lembah Harau, Kapalo Banda Taram, dan Saribu Gonjong dapat dilisensikan untuk produk wisata, kopi lokal, atau kerajinan, menghasilkan retribusi lisensi.
3. Kredit karbon (carbon credit): Nagari-nagari dengan tutupan hutan tinggi dapat dijadikan proyek karbon, di mana Pemda menerima pembayaran dari perusahaan swasta yang butuh *carbon offset*.

Contoh konkret:

1. Nagari Taeh Bukik dan Nagari Gunung Malintang yang memiliki hutan lindung seluas ribuan hektar, dapat didaftarkan sebagai kawasan penyerap karbon. Hasil penjualan kredit karbon (melalui registri nasional atau pasar sukarela) bisa menghasilkan Rp200–500 juta per tahun per nagari.

2. Festival Lembah Harau yang telah memiliki brand dan daya tarik nasional bisa dijadikan *IP* (intellectual property) yang dikelola secara komersial oleh BUMD Wisata. Produk merchandise, sponsor, dan lisensi konten bisa dimonetisasi.

### 3.c. Model Manajemen dan Evaluasi Aset Digital

Agar monetisasi berjalan efektif, Pemda perlu:

1. Membentuk Tim Aset Daerah Terpadu lintas OPD untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menyusun skema monetisasi aset.
2. Menyusun peta digital aset daerah berbasis GIS, lengkap dengan status legalitas, potensi ekonomi, dan rencana pemanfaatan.
3. Mengembangkan dashboard Aset-PAD, yang menampilkan kontribusi tiap aset ke kas daerah dan memantau performa monetisasi secara berkala.

## Monetisasi Aset Daerah



Monetisasi Aset Berwujud  
(Inbreng)



Monetisasi Aset  
Tak Berwujud  
(Lisensi Hak Paten)



Manajemen dan Evaluasi  
Aset Digital

## BAB IV

## DIVERSIFIKASI SUMBER PAD BERBASIS

## POTENSI UNGGULAN DAERAH

Peningkatan PAD tidak hanya ditopang oleh optimalisasi sektor yang ada, tetapi juga melalui strategi diversifikasi sumber pendapatan berbasis potensi riil di masing-masing wilayah. Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki sektor-sektor unggulan yang kuat, baik dari sisi produksi primer (gambir, ikan air tawar, peternakan, dan pertanian), wisata, maupun SDM kreatif nagari. Dengan strategi hilirisasi, tata kelola modern, dan konektivitas pasar, setiap sektor ini dapat berkontribusi terhadap PAD secara nyata dan berkelanjutan.

## 4.a. Hilirisasi Komoditas Unggulan

## 1. Gambir

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu produsen gambir terbesar di Indonesia, terutama di Kecamatan Kapur IX, Pangkalan Koto Baru, dan Suliki. Namun, mayoritas produk masih diekspor dalam bentuk mentah. Dengan membangun pabrik ekstraksi gambir di wilayah Kapur IX melalui kerja sama BUMD dan investor, nilai tambah dapat diciptakan. Hasil olahan gambir dapat digunakan untuk industri kosmetik, tinta, bahan herbal, dan pewarna alami yang memiliki permintaan tinggi secara global. Hal ini akan meningkatkan harga jual dan margin keuntungan, sekaligus menghasilkan retribusi industri, izin usaha, dan pajak lokal bagi daerah.

Langkah konkret yang dapat diambil meliputi:

1. Pendirian Pabrik Ekstraksi Gambir di Kapur IX dengan sistem inbreng aset berupa lahan milik Pemda dan investasi mesin dari mitra swasta.
2. Pembentukan BUMD Hilirisasi Gambir yang mengelola produksi, sertifikasi mutu, dan pemasaran produk olahan (katekin, tanin, dll).
3. Penetapan zona sentra produksi gambir berbasis nagari (misalnya Nagari Muaro Paiti dan Nagari Galugua), yang dilengkapi pusat pelatihan petani, gudang fermentasi, dan laboratorium uji mutu.
4. Digitalisasi tata niaga gambir melalui marketplace lokal dan sistem tracking QR pada produk ekspor.

Dengan pendekatan ini, potensi PAD dari sektor gambir bisa diperoleh dari:

1. Pajak dan retribusi izin industri dan ekspor.
2. Fee lisensi penggunaan label daerah (contoh: "Gambir Kapur IX Bersertifikat Halal dan Ekspor").
3. Pendapatan sewa gudang dan retribusi hasil panen yang ditimbang di STA (Storage Terintegrasi Agribisnis).

Jika dilakukan optimal, sektor gambir tidak hanya menjadi penggerak ekonomi nagari, tetapi juga sumber PAD berjangka panjang berbasis ekspor bernilai tambah tinggi.

## 2. Kakao dan Pisang

Di Kecamatan Situjuh Limo Nagari dan Mungka, potensi kakao dan pisang belum dikelola maksimal. Pengembangan industri coklat rumahan dan keripik pisang modern dapat menghasilkan PAD dari sektor izin edar, sewa booth UMKM, dan kerja sama promosi melalui festival nagari.

#### 4.b. Perikanan Air Tawar

Kabupaten ini memiliki produksi ikan air tawar terbesar di Sumbar, dengan sentra budidaya di Kecamatan Harau, Luak, dan Guguak. Potensi PAD dapat diperoleh dari:

1. Retribusi sewa kolam pemerintah yang dikelola melalui sistem QRIS.
2. Lisensi pengolahan dan pemasaran produk olahan (ikan asap, abon ikan) oleh UMKM binaan Dinas Perikanan.
3. Distribusi melalui koperasi digital yang membayar fee kepada Pemda.

#### 4.c. Peternakan dan Zona Sapi Rakyat

Zona peternakan di Kecamatan Suliki dan Gunuang Omeh dapat menjadi lumbung sapi rakyat dan penghasil PAD baru melalui:

1. Retribusi sertifikasi bibit dan kesehatan hewan.
2. Sistem pendataan dan retribusi identitas ternak digital.
3. Kerja sama dengan koperasi daging lokal yang dikelola BUMDes dan BUMD.

#### 4.d. Wisata dan Ekowisata Nagari

Dengan destinasi andalan seperti Lembah Harau, Saribu Gonjong, dan Kapalo Banda Taram, serta kawasan budaya seperti Nagari Taeh dan Koto Tinggi, sektor pariwisata bisa memberikan kontribusi PAD yang besar melalui:

1. Tiket masuk berbasis QRIS dan tarif dinamis (musiman).
2. Sewa booth kuliner dan oleh-oleh yang dikelola melalui sistem digital.
3. Kerja sama dengan komunitas digital marketing untuk promosi wisata yang mendatangkan insentif daerah dari platform nasional.

#### 4.e. Sawah Pokok Murah dan Pangan Strategis

Program Sawah Pokok Murah di Kecamatan Suliki, Gunuang Omeh, dan Bukit Barisan ditujukan untuk menekan biaya produksi pertanian namun meningkatkan produktivitas. Daerah bisa menarik PAD dari:

1. Sewa lahan pertanian milik daerah melalui lelang terbuka digital.
2. Distribusi hasil pertanian yang dijual oleh koperasi berbasis Nagari Creative Hub.
3. Retribusi penggunaan alat pascapanen dan packaging.

#### 4.f. Nagari Creative Hub dan Produk Digital Nagari

Pendirian Nagari Creative Hub di setiap nagari unggulan berperan sebagai inkubator UMKM dan pusat literasi digital. Kontribusi PAD bisa berasal dari:

1. Lisensi produk kreatif (kuliner, kerajinan, konten digital).
2. Sewa coworking space dan studio produksi bagi pelaku usaha muda.
3. Pelatihan bersertifikat berbayar dengan sistem QRIS.

#### 4.g. Koperasi Merah Putih Nagari

Dirancang sebagai koperasi strategis yang menangani sektor ril dan beroperasi lintas nagari, Koperasi Merah Putih menjadi entitas ekonomi rakyat yang berbagi hasil dengan pemerintah daerah. Pendapatan diperoleh dari:

1. Dividen koperasi berbasis distribusi produk lokal.
2. Kemitraan distribusi logistik UMKM (misalnya dengan PT Pos, JNE, atau marketplace nasional).
3. Keterlibatan sebagai offtaker hasil panen rakyat dan komoditas unggulan.

#### 4.h. Pendidikan Global dan Kampung Pelajar Nagari

Untuk menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan daya saing daerah, Kabupaten Lima Puluh Kota perlu berinvestasi dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berbasis nagari. Salah satu strategi kunci adalah membangun Kampung Pelajar Nagari.

yaitu pusat pendidikan alternatif berbasis komunitas yang menggabungkan pelatihan bahasa asing, literasi digital, kewirausahaan, dan soft skills untuk anak muda nagari.

Setiap kampung pelajar dapat berperan sebagai:

- Pusat pelatihan bahasa Inggris dan Arab, yang mendukung program SDM ekspor ke luar negeri seperti program magang ke Jepang, Timur Tengah, dan ASEAN.
- Inkubator pelajar prasejahtera yang diberi beasiswa dari dana CSR lokal, donatur diaspora, atau skema dana abadi daerah (kerja sama Dinas Pendidikan, Baznas, dan LPDP daerah).
- Ruang belajar teknologi dan literasi digital seperti desain grafis, konten kreator, atau logistik digital (e-commerce).
- Hub pengembangan UMKM pelajar dan remaja di mana siswa SMA/SMK/mahasiswa dapat memasarkan produk digital atau olahan lokal secara daring.

Untuk mendorong kontribusi PAD, model kampung pelajar ini dapat menghasilkan:

- Retribusi pelatihan bersertifikat bagi peserta dari luar nagari.
- Lisensi kerja sama dengan lembaga internasional seperti British Council, lembaga bahasa asing, dan NGO pendidikan.
- Pendapatan dari pengelolaan koperasi pelajar yang menjual produk edukatif, bahan pelatihan, dan layanan jasa digital.

Contoh penerapan:

- Nagari Gunung Malintang dan Taeh Baruah menjadi pilot project Kampung Pelajar Berbasis Bahasa dan Ekspor SDM, bekerja sama dengan alumni LPDP dan organisasi diaspora Lima Puluh Kota.
- Setiap peserta pelatihan yang lulus akan mendapat akses beasiswa atau kontrak magang ke luar negeri, dan hasilnya akan dikembalikan sebagai donasi rutin ke kampung halaman (sistem reverse donation diaspora).

Dengan demikian, Kampung Pelajar bukan hanya mencetak SDM unggul, tetapi juga menciptakan ekosistem pendukung PAD jangka panjang yang tumbuh dari komunitas itu sendiri.

#### 4.i. Pengelolaan Sampah Nagari sebagai Sumber PAD dan Ekonomi Sirkular

Sampah yang selama ini dianggap beban dapat diubah menjadi sumber daya ekonomi dan penerimaan daerah apabila dikelola dengan pendekatan modern berbasis ekonomi sirkular dan partisipasi nagari. Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki peluang besar untuk mengembangkan Sistem Pengelolaan Sampah Nagari Mandiri yang tidak hanya mengurangi volume sampah ke TPA, tetapi juga membuka peluang usaha, lapangan kerja, dan kontribusi fiskal lokal.

Model yang dapat diterapkan meliputi:

- Pembentukan Unit Bank Sampah Nagari (BSN) di setiap nagari padat penduduk, seperti Sarilamak, Taram, Koto Baru Simalanggang, dan Lubuak Batingkok.
- Pembangunan TPS 3R (Reuse, Reduce, Recycle) skala nagari, dikelola oleh BUMNag atau koperasi lingkungan.
- Pengolahan organik menjadi pupuk kompos untuk pertanian lokal dan pengelolaan perkebunan, disertai skema penjualan kompos ke petani melalui QRIS.
- Pemilahan dan jual beli sampah non-organik (plastik, logam, kertas) dengan mitra pengepul regional, yang menghasilkan pendapatan langsung bagi unit pengelola.

Sumber PAD yang dihasilkan:

- Retribusi pengelolaan sampah skala nagari berdasarkan layanan angkut dan pengolahan.
- Pajak atau bagi hasil dari usaha kompos dan daur ulang melalui koperasi atau BUMNag.
- Fee lingkungan dari perusahaan atau pelaku usaha yang bermitra dalam program CSR hijau berbasis karbon atau sirkularitas.

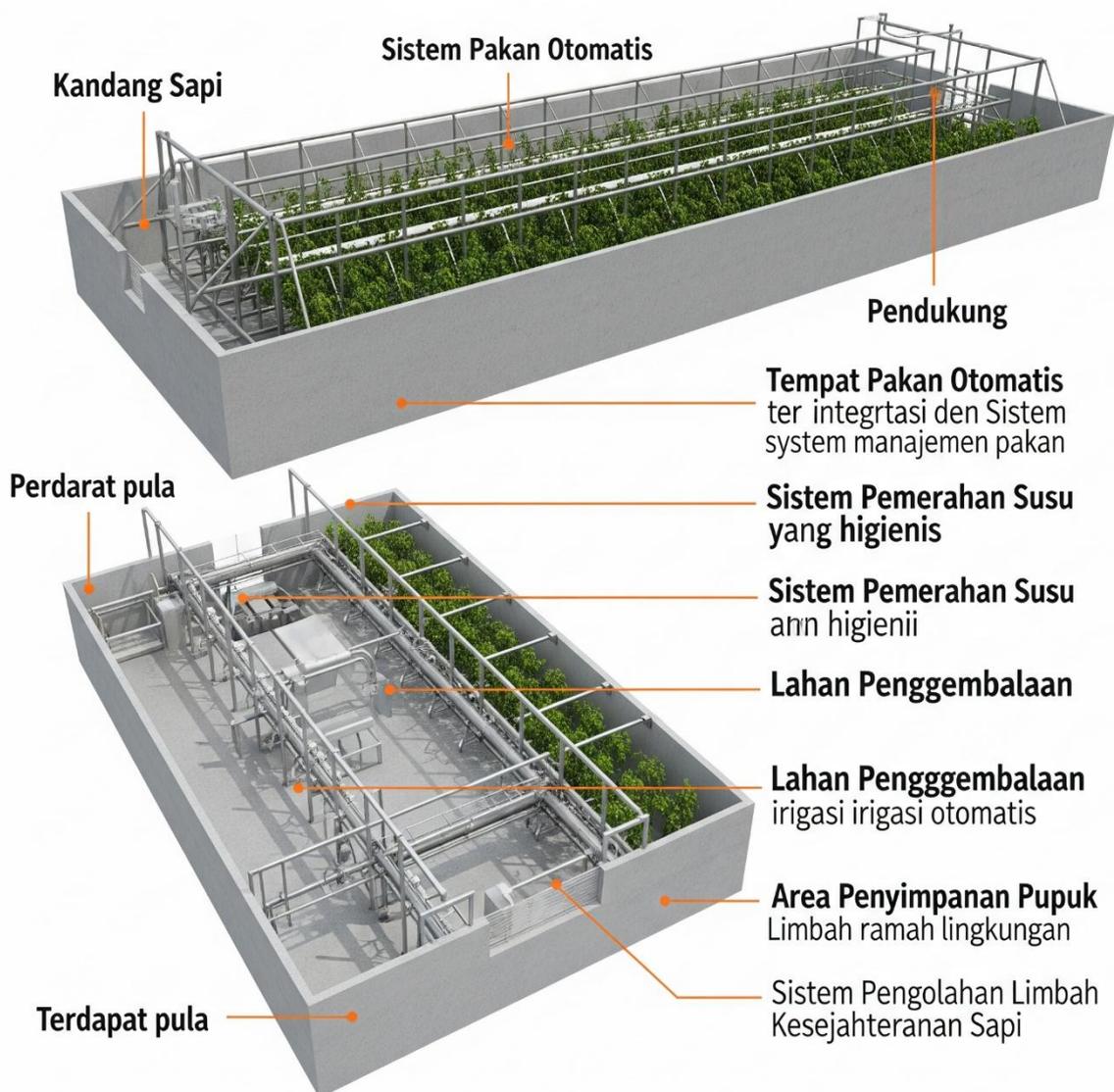
Contoh penerapan:

- Nagari Mungka dan Nagari Koto Tinggi mengembangkan sistem sampah terpadu berbasis QRIS. Warga membayar retribusi layanan melalui scan QR per bulan, dan mendapat insentif saat menyetorkan sampah non-organik yang sudah dipilah.
- BUMNag Taeh Baruah mengelola TPS 3R dan menjual 2 ton kompos per bulan ke petani lokal, menghasilkan pendapatan Rp5 juta/bulan dan menyetor 20% ke kas nagari.

Selain aspek fiskal, pengelolaan sampah nagari juga mendukung pencapaian target Zero Waste to TPA 2030, meningkatkan kesadaran lingkungan, dan mendorong inovasi sosial berbasis ekonomi hijau.

Dengan sistem ini, sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab sosial, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan ekonomi dan sumber penerimaan lokal yang berkeadilan dan berkelanjutan.

## PETERNAKAN SAPI MODERN



### Bank Bank Sampah Nagari



### TPS 3R



### Proses pengolahan organik



Babdan Teks Menygas Sanpah Perpuari

### Pengolahan Kompos



Pengepul Sampah Non-Organik





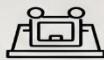
## Nagari Creative Hub

Ikona



Lisensi Produk Kreatif  
(Kuliner, Kerajinan  
Konten Digital)

Elemen penghasil PAD



Sewa Coworking Space  
Studio Produksi

Elemen pengmisikan



Kode QRIS  
Pelatihan Bersertifikat  
(QRIS)

## KAMPUNG PELAJAR NAGARI Pusat Pendidikan Modern

RUANGS PELAJA INGASA



RUANG KELAS  
BAIGRIS DAN ARBA  
Teknologi pembelajaran terkini



PELATIHAN BAHASA

TUSURVAIHAN SELAJAI



STUDIO Desalogi dan  
dan Literasi berteknologi tinggi

PELATIHAN BAHASA



STUDIA PELAJAN  
PRODUK PELAJAR

LITERASI DIGITAL



KANTOR KER SAIN Psertifikat  
Tertata rapi

KEWIRAUSAHAAN PELAJAR



KOPERASI PELAJAAN  
PROUDCIF EDUKAIK

PENDAFTARAN PELATIHAN



PENDAFTARAN PERSERINAT  
(Misalnya

KERJA SAMA INTERNASIONAL



Kerja sama  
Lembaga Internasional  
meandakan global

PENDAPATAN ASLI DAERAH



KOPERASI PELAJAR  
PRODUK EDUKATIF

# SAWAH POKOK MURAH & PANGAN STRATEGIS



## FASILITAS PENDUKUNG



GUDANG PENYIMPANAN HASIL MODERN

TAMPILKAN INFORMAN SANG MUDAH DIPAHAMI

## GUDANG HASIL PANEN



TEMPAT PENGOLAHAN HASIL LENGKAP

TEMPAT PENGOLAHAN HASIL LENGKAP



## DISTRIBUSI PRODUK LOKAL



PARKIR PARKIR



PT Pos Indonesia

## KEMITRAAN LOGISTIK UMKM



Sayur Hasil Sayuran PT POS INDONESIA

## PANSIL TERBUKA



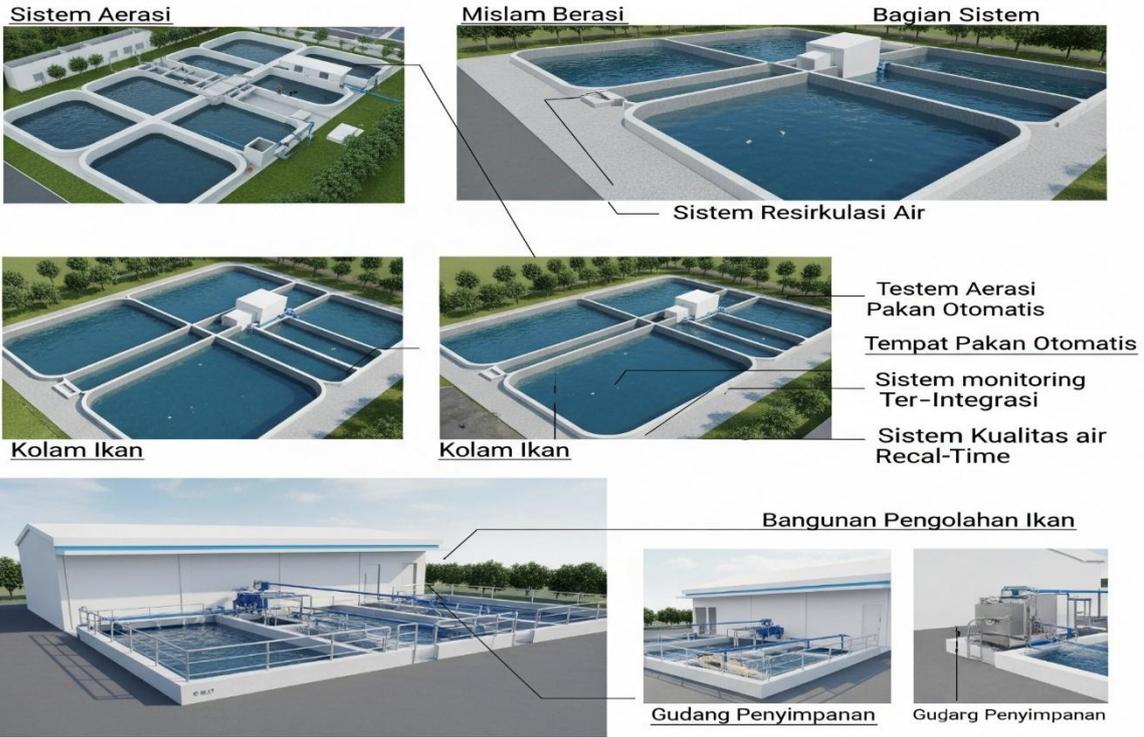
OFFTAKER HASIL PANEN

DIENCAHPUN SEBAGAI PROGRAM OFFTAKER KOPERASI

ai



### Peternakan air tawar



## BAB V

## PENINGKATAN SDM MELALUI SKEMA LPDP DAERAH

Pembangunan SDM unggul merupakan fondasi dari pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menginisiasi program beasiswa dan pengembangan kompetensi yang lebih strategis melalui skema LPDP Daerah—yakni dana abadi pendidikan berbasis kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, BUMD, serta donatur diaspora.

**5.a. Skema LPDP Daerah Lima Puluh Kota**

Program ini dirancang untuk mendanai:

- a. Beasiswa penuh jenjang S1–S2–S3 di bidang-bidang strategis seperti pertanian presisi, teknologi pangan, tata kelola fiskal, logistik digital, kehutanan karbon, dan energi hijau.
- b. Pelatihan jangka pendek dan sertifikasi internasional di sektor industri prioritas seperti ekspor UMKM, industri halal, teknologi digital, dan hilirisasi SDA.
- c. Program magang luar negeri (internasionalisasi SDM nagari) seperti pemagangan ke Jepang, Timur Tengah, ASEAN, atau pertukaran pelajar.

**5.b. Skema Pembiayaan dan Mitra**

Dana beasiswa dapat dihimpun dari:

- a. APBD 0,5–1% per tahun khusus untuk SDM unggul.
- b. Kontribusi CSR perusahaan lokal seperti bank pembangunan daerah, perkebunan, dan distribusi energi.
- c. Kongsi beasiswa diaspora melalui skema reverse remittance, di mana alumni LPDP dan diaspora mendanai satu pelajar nagari per tahun.

**5.c. Imbal Balik dan Kontribusi PAD**

Program ini bukan hanya beasiswa, tapi investasi fiskal jangka panjang. Setiap peserta wajib:

- a. Mengabdikan 5 tahun di sektor strategis daerah (BUMD, OPD teknis, koperasi, atau nagari).
- b. Membangun unit usaha berbasis hasil studi, yang akan didampingi hingga menghasilkan kontribusi pajak dan lisensi ke daerah.
- c. Membuat laporan inovasi tahunan dan roadmap kontribusi ekonomi lokal.

Contoh:

- Seorang anak nagari Suliki menerima LPDP Daerah untuk studi magister energi terbarukan di UGM.
  - a. Sepulangnya, ia merintis proyek biogas peternakan skala nagari, bermitra dengan BUMDes, menghasilkan PAD dari penjualan gas dan retribusi teknis.
  - b. Seorang pemuda Situjuah belajar pengolahan pangan halal di Malaysia melalui magang. Pulang ke daerah membangun UMKM sertifikasi halal, yang membayar izin usaha, retribusi, dan ekspor melalui koperasi lokal.



# Dana LPDP Daerah Lima Puluh Kota



## BAB VI

### KOPERASI MERAH PUTIH NAGARI UNTUK PENGUNGKIT PAD DAN EKONOMI KERAKYATAN

Untuk memperkuat struktur ekonomi lokal dan menyalurkan hasil produksi nagari secara sistematis, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menginisiasi Koperasi Merah Putih Nagari sebagai entitas ekonomi rakyat lintas sektor. Koperasi ini tidak hanya melayani kebutuhan anggota, tetapi bertindak sebagai offtaker, distributor, dan agregator produk unggulan daerah, sekaligus sebagai badan usaha yang menyumbangkan bagian keuntungannya kepada kas daerah secara resmi dan terukur.

#### 6.a. Struktur dan Fungsi Koperasi Merah Putih

Koperasi Merah Putih didesain sebagai:

- Koperasi multipihak, terdiri dari petani/peternak, pelaku UMKM, BUMNag, diaspora, dan pemerintah daerah (dalam bentuk penyertaan modal atau infrastruktur).
- Distributor dan logistik dagang, yang menjembatani produk nagari dengan pasar regional, nasional, dan ekspor.
- Agregator data produksi dan pemasaran, yang mampu menyusun proyeksi produksi dan kebutuhan pasar berbasis digital.
- Pusat layanan usaha rakyat, termasuk keuangan mikro, penyewaan alat produksi, dan layanan sertifikasi usaha.

#### 6.b. Sektor Fokus dan Kontribusi PAD

Koperasi Merah Putih fokus pada sektor-sektor yang telah terbukti kuat dan memiliki potensi fiskal:

- Gambir, kakao, dan hasil perkebunan → potensi pajak usaha dan retribusi distribusi.
- Pangan lokal (beras, ikan, hortikultura) → potensi retribusi pemakaian STA (storage) dan fee distribusi.
- UMKM kuliner, kerajinan, dan digital → potensi lisensi merek daerah, izin usaha, dan promosi wisata berbasis produk.

Kontribusi PAD berasal dari:

- Dividen tahunan koperasi ke Pemda (10–20%) sebagai hasil penyertaan modal aset atau operasional.
- Retribusi pemakaian gudang, fasilitas, dan promosi digital.
- Pajak jasa logistik dan distribusi yang dikolektifkan secara legal melalui sistem digital terhubung dashboard PAD.

#### 6.c. Model Implementasi dan Contoh Lapangan

- Koperasi Merah Putih Harau Raya mengelola hasil pertanian dari nagari sekitarnya dan memasarkan produk olahan berbasis gambir, salak, dan beras organik ke Padang dan Pekanbaru.
- Koperasi Situjuh Logistik Pangan bertindak sebagai mitra tetap pasar daring (Tokopedia, Blibli) dan menerima fee logistik dari hasil pengiriman produk UMKM Lima Puluh Kota.
- Koperasi Digital Muda Nagari Suliki menjadi pengelola e-commerce, marketplace wisata, dan studio produksi konten digital, berkontribusi melalui pajak iklan dan retribusi layanan daring.

**6.d. Kelembagaan dan Dukungan Kebijakan**

Pemda dapat memperkuat koperasi ini melalui:

- Perbup khusus tentang Koperasi Merah Putih Nagari, dengan target kontribusi PAD minimal 10% dari total pendapatan koperasi.
- Insentif fiskal dan pelatihan dari Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan.
- Kemitraan dengan Himbara, fintech, dan diaspora untuk permodalan dan promosi.



## BAB VII

### INFRASTRUKTUR FISKAL DAN FISKALISASI NAGARI

Untuk memastikan peningkatan PAD berjalan berkelanjutan dan terukur, dibutuhkan penguatan infrastruktur fiskal dan sistem fiskalisasi hingga level nagari. Artinya, pemerintah daerah tidak hanya fokus pada belanja dan pengumpulan pendapatan di level kabupaten, tetapi juga memperluas jangkauan sistem fiskalnya ke tingkat desa/nagari sebagai simpul ekonomi produktif.

#### 7.a. Digitalisasi Fiskal Nagari

Nagari sebagai unit otonomi adat dan administratif memiliki potensi besar untuk menjadi basis fiskal daerah. Pemda dapat membangun Sistem Informasi Keuangan dan Penerimaan Nagari (SIKEP Nagari) yang mengintegrasikan:

- Laporan keuangan nagari.
- Pendapatan asli nagari.
- Retribusi lokal seperti pasar, parkir, dan wisata.
- Dana transfer ke nagari.

Sistem ini wajib terkoneksi dengan dashboard PAD kabupaten untuk transparansi dan akuntabilitas lintas level pemerintahan.

#### 7.b. Fiskalisasi Aset Nagari

Setiap nagari di Lima Puluh Kota memiliki aset tetap seperti tanah, bangunan, pasar, dan fasilitas wisata. Dengan sistem fiskalisasi aset nagari, seluruh aset tersebut harus:

- Dicatat dalam neraca aset digital kabupaten.
- Dioptimalkan untuk menghasilkan PAD melalui sewa, pemanfaatan usaha, atau kerja sama pihak ketiga.
- Disertakan dalam skema bagi hasil dengan kabupaten.

Contoh: Nagari Sarilamak memiliki pasar dan los sayur. Aset ini dikelola oleh BUMNag, tetapi retribusinya terpantau melalui sistem digital, dan 10% dari hasil bersihnya disetorkan sebagai pendapatan kabupaten.

#### 7.c. Penataan Transfer Fiskal Berbasis Kinerja (TFBK)

Pemda dapat menyusun ulang mekanisme transfer keuangan ke nagari dengan pendekatan Transfer Fiskal Berbasis Kinerja, di mana nagari yang:

- Meningkatkan pendapatan lokal.
- Menyusun laporan keuangan tepat waktu.
- Menjalankan pelayanan publik yang inovatif.

akan mendapatkan dana tambahan/insetif dari APBD. TFBK ini akan mendorong kompetisi sehat dan profesionalisme pengelolaan fiskal di tingkat bawah.

#### 7.d. Pusat Data Fiskal Daerah

Pembangunan Pusat Data Fiskal Lima Puluh Kota yang menyatukan seluruh data PAD, aset, belanja, kinerja pajak, dan transfer akan mempercepat pengambilan keputusan berbasis data (data-driven

policy). Data ini menjadi rujukan perencanaan fiskal, kebijakan pajak, penyusunan APBD, dan monitoring kinerja OPD serta nagari.



## BAB VIII

### PENINGKATAN DANA TRANSFER DAERAH DAN SINERGI PERPAJAKAN PUSAT–DAERAH

Untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah secara menyeluruh, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga perlu mengoptimalkan dua sumber penting yang sering kali belum dikelola maksimal: Dana Transfer dari Pusat (DAU, DAK, DBH, DID) dan kontribusi pada penerimaan perpajakan nasional yang memiliki imbas langsung pada kinerja Dana Insentif Fiskal (DIF) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

#### 8.a. Perbaikan Database Parameter Transfer ke Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Transfer Lainnya dari pusat ditentukan oleh parameter objektif seperti jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, indeks kemahalan konstruksi, dan variabel fiskal lainnya. Namun demikian, data yang digunakan seringkali berasal dari sumber lama atau tidak sinkron antara Pemda, BPS, dan DJPK Kemenkeu.

Strategi Lima Puluh Kota:

- a. Melakukan validasi dan sinkronisasi ulang data dasar seperti luas wilayah, jumlah penduduk by name by address, jumlah satuan pendidikan dan fasilitas layanan.
- b. Membangun sistem basis data spasial dan statistik daerah yang kompatibel dengan sistem DJPK.
- c. Melakukan pengiriman data dukung resmi ke DJPK melalui kanal Kementerian Dalam Negeri dan memanfaatkan sistem e-planning yang terhubung.

Dampak positifnya:

- a. Potensi peningkatan alokasi DAK tematik dan afirmasi.
- b. Koreksi indeks fiskal yang mendongkrak perolehan DAU.
- c. Penguatan posisi dalam pembagian DBH SDA, pajak, dan cukai.

#### 8.b. Dukungan Aktif terhadap Pemungutan Pajak Pusat (PPH dan PPN)

Meski bukan sumber PAD langsung, peran Pemda dalam membantu optimalisasi PPh dan PPN sangat penting karena akan memperkuat posisi fiskal pusat, yang berimbas pada nilai Dana Transfer dan kinerja fiskal daerah di mata pusat.

Langkah strategis yang dilakukan antara Pemkab dan KPP Pratama:

##### 1. Penyediaan Data Perizinan Daerah

- Data izin usaha, IMB, sertifikat tanah, NIB, izin bangunan, dan SKPD lainnya diserahkan rutin ke KPP.
- Semua data usaha yang beroperasi di Lima Puluh Kota dilaporkan untuk mengejar potensi PPh dan PPN yang belum tergarap.

##### 2. Perda NPWP Lokasi dan NITKU

- Penyusunan Peraturan Daerah tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Lokasi (NPWP-L) atau Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) untuk semua tempat usaha.
- Tujuannya agar setiap toko, kios, warung, dan usaha berbadan hukum terdaftar dengan lokasi tetap dan bisa diaudit bersama KPP.

## BAB X

### PENUTUP

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota bukan sekadar soal menambah jumlah penerimaan, melainkan merupakan transformasi menyeluruh dalam cara berpikir, merencanakan, dan mengelola fiskal daerah secara cerdas, adil, dan berkelanjutan.

Melalui strategi yang telah dirumuskan dalam dokumen ini, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menempatkan PAD sebagai fondasi utama pembangunan, yang bertumpu pada kolaborasi seluruh OPD, peran aktif nagari, optimalisasi aset, digitalisasi sistem keuangan, serta penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan.

Rangkaian strategi yang mencakup delapan pilar dan dilengkapi dengan target kemandirian fiskal 50% pada 2029, menjadi bukti komitmen daerah untuk tidak lagi bergantung penuh pada transfer pusat, tetapi justru menjadi motor pertumbuhan ekonomi lokal yang berdaya saing.

Keberhasilan strategi ini menuntut sinergi antarpemangku kepentingan: kepala daerah, TAPD, DPRD, OPD, nagari, BUMD, pelaku usaha, komunitas digital, diaspora, dan masyarakat secara keseluruhan. Perubahan cara pandang dari “pengguna anggaran” menjadi “penghasil penerimaan” menjadi kunci perubahan budaya fiskal daerah.

Dengan semangat inovatif, berbasis teknologi, dan keadilan fiskal, strategi PAD ini akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan Lima Puluh Kota menuju daerah yang mandiri secara fiskal, inklusif secara sosial, dan maju secara ekonomi.

**“Nagari Kuat – Fiskal Hebat – Lima Puluh Kota Mandiri”**

## Biodata Penulis

### Bayu Agatyan

**Bayu Agatyan**, lahir di Tarakan pada tanggal 16 Desember 1976. Saya adalah pegawai aktif dari **Direktorat Jenderal Pajak (DJP)**, saat ini mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan tugas **lintas fungsi (Cross-Function)** di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Saat ini menjabat sebagai **Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK)** di **Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat**. Penugasan ini saya jalani dengan penuh dedikasi sebagai bentuk kontribusi terhadap sinergi internal Kementerian Keuangan, khususnya dalam memperkuat pelaporan keuangan pemerintah, mendorong reformasi belanja daerah, dan menciptakan konektivitas fiskal yang produktif antara pusat dan daerah.

Saya menyelesaikan pendidikan **Magister Manajemen Keuangan** di **Universitas Trisakti** pada tahun 2007, setelah sebelumnya memperoleh gelar **Sarjana Teknik Geodesi** dari **Universitas Gadjah Mada**. Pendidikan awal saya tempuh di **STAN Malang** pada program Diploma III Penilai PBB (1994–1997), dan sejak saat itu saya membentuk karier yang lintas bidang: mulai dari valuasi properti, pengawasan pajak, keberatan, hingga transformasi fiskal daerah. Penguatan keilmuannya diperluas melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi profesional internasional, termasuk dari **Japan International Cooperation Agency (JICA)**, **INSPEN Malaysia**, dan **International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD)** Belanda, khususnya dalam bidang transfer pricing dan indirect taxation.

Dalam perjalanan karier saya, saya tidak hanya bertugas secara administratif, tetapi juga aktif menyusun **berbagai kajian strategis, naskah kebijakan, dan studi lintas sektor**. Saya percaya bahwa setiap belanja pemerintah harus mampu menciptakan nilai tambah, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan menghasilkan pembaruan mindset fiskal. Hingga saat ini, telah menyusun dan berkontribusi **dokumen kajian strategis**, mulai dari studi kelayakan smart farming gambir, diplomasi ekspor komoditas unggulan, zona logistik baterai (EV Corridor), pengelolaan sampah Zero TPA, hingga pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang. Beberapa Kajian yang telah diselesaikan:

#### 1. Smart Farming dan Industrialisasi Gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota

Kajian yang merancang skema pertanian presisi berbasis IoT dan hilirisasi produk gambir untuk ekspor, lengkap dengan simulasi ROI, kelembagaan petani, dan dashboard monitoring digital.

#### 2. Konsep Pengelolaan Sampah Zero TPA untuk 20 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Proposal lomba lintas daerah untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah berbasis 3R, tanpa ketergantungan pada TPA, serta mendorong perubahan mindset dan kolaborasi regional.

### 3. **Blueprint Transformasi Kota Padang sebagai Financial & Service City 2045**

Kajian makro yang menyatukan transformasi digital, fiskal, dan ekonomi kreatif untuk menjadikan Padang sebagai pusat jasa keuangan regional berbasis ekspor, devisa, dan teknologi blockchain.

### 4. **Kajian Pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang 2025–2029**

Telah masuk dalam RPJMD Provinsi Sumbar tahun 2025-2029, kajian ini menjadi dasar strategis menjadikan Teluk Tapang sebagai simpul logistik ekspor komoditas unggulan kawasan barat Sumatera.

### 5. **Kajian Hilirisasi Perkebunan Gambir di Lima Puluh Kota dan Pesisir Selatan**

Mendorong terbentuknya *Desa Devisa Pertama di Sumatera Barat* berbasis ekspor gambir, dengan strategi kelembagaan, teknologi pengolahan, dan branding global.

### 6. **Kajian Strategi Peningkatan PAD dan Transformasi Fiskal Pesisir Selatan**

Kajian mendalam tentang optimalisasi PBB, pemanfaatan aset daerah, digitalisasi pajak daerah, dan persiapan belanja pegawai maksimal 30% dari PAD tahun 2027.

### 7. **Kajian Lompatan Strategis Sumbar 2025–2029: Dari Nagari ke Global, dari Aset Tidur ke Sumber Devisa**

Narasi baru pembangunan fiskal Sumbar berbasis perubahan paradigma: menghidupkan aset pasif menjadi mesin devisa aktif, mendobrak keterbatasan fiskal melalui konektivitas global.

### 8. **Kajian RPJMD 20 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat**

Memberikan masukan strategis terhadap visi fiskal daerah, dengan misi utama meningkatkan kemandirian fiskal hingga 50% melalui belanja produktif dan inovasi sumber pendapatan. Kajian ini menjadi dasar perubahan mindset semua Kab/Kota dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah serta menyongsong penerapan UU 1 tahun 2022 tentang HKPD dan PMK 24 tahun 2024.

### 9. **Kajian Rice Milling Unit (RMU) Pesisir Selatan**

Rancangan industrialisasi pascapanen beras lokal berbasis rantai pasok dan teknologi penggilingan modern, sebagai upaya substitusi impor dan penguatan ketahanan pangan.

### 10. **Kajian Zona Logistik Baterai Listrik (EV Corridor) Kabupaten Sijunjung**

Menyusun feasibility study lengkap kawasan ekonomi baru berbasis industri baterai dan mineral kritis, terintegrasi dengan PP 8/2025 dan strategi energi hijau nasional.

### 11. **Kajian Pembangunan Penjara Koruptor di Kepulauan Mentawai**

Kajian geostrategis **dan** tata kelola kelembagaan untuk mewujudkan kawasan isolasi koruptor nasional berbasis keamanan tinggi dan pendekatan rehabilitatif.

## 12. Kajian Pengembangan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di Kepulauan Mentawai

Merancang peta jalan energi bersih Mentawai berbasis PLTS, termasuk pemetaan lokasi, kapasitas instalasi, pembiayaan KPBU/SMV, serta integrasi ke grid lokal.

## 13. Kajian Digitalisasi Pembayaran PBB P2 melalui QRIS, NFT di Kota Pariaman

Memberikan solusi kemudahan pembayaran PBB P2 dan menjadi pilot project proses perubahan fiskal.

Aktif dalam pengembangan inovasi fiskal seperti penerapan **Blockchain untuk transparansi pelaporan daerah**, pengembangan  **kredit karbon sebagai sumber PAD**, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung perluasan PBB-P2 dan retribusi daerah.

Sebagai aparatur negara, saya percaya bahwa perubahan adalah keniscayaan. Saya selalu berusaha menjadi bagian dari solusi—bukan hanya dalam menjalankan tugas, tetapi juga dalam **menciptakan ide-ide baru, mendobrak batas sektoral**, dan memperkuat jembatan fiskal antara pusat dan daerah dan menjalankan fungsi *Regional Chief Economic dan Financial Advisory* lebih tepat sasaran dan membuat perubahan yang pasti.

### Moto hidup saya:

"Perubahan itu pasti. Selalu terdepan. Pokoknya BISA."